

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam dan budaya Jawa memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sosial politik di masyarakat. Dalam stratifikasi masyarakat Islam Jawa dibedakan secara horisontal dan vertikal. Secara horisontal dapat dibedakan menjadi kaum bangsawan (*ndara*), *wong dagang* saudagar (pedagang), dan *wong cilik* (orang kecil atau rakyat kecil). Sedangkan secara vertikal masyarakat Islam Jawa dibedakan menjadi kaum *santri* dan *abangan*. Kaum santri diartikan sebagai masyarakat keluaran pondok pesantren namun pengertian modern diartikan sebagai kaum santri yang biasanya dikaitkan sebagai masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada perintah agama dan tinggal di sekitaran masjid yang biasanya tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan abangan merupakan golongan orang Jawa lainnya yang jarang menjalankan ibadah menurut agama Islam namun masih kepercayaan Hindu-Buddha masih dipegang teguh dan kepercayaan asli seperti animisme serta masyarakat yang masih mepercayai mitos-mitos dan *tahayul-tahayul* yang kemudian secara berkelompok mereka hidup sebagai kaum petani di desa-desa. Sejauh kita memperhatikan kehidupan suatu komunitas dapat diketahui bahwa stratifikasi suatu masyarakat mungkin

tampak tajam, pasti, dan mantap. Bila kriterium pembagian itu didasarkan atas keturunan, kelahiran atau pertalian darah, maka keberadaan kelas cenderung menjadi pasti. Tetapi bila kriterium itu berasal dari pemilahan pekerjaan atau kemampuan perseorangan, maka pembagian itu cenderung menjadi kurang tegas (Zaini, 2002: 207-211). Oleh karena itu pembedaan stratifikasi masyarakat Islam dan kebudayaan Jawa dapat mempengaruhi kehidupan sosio-regulus dan sosio-politik masyarakat. Istilah santri yang mula-mula dan biasanya memang dipakai untuk menyebut murid yang mengikuti pendidikan Islam, merupakan perubahan bentuk dari kata India *shastri* yang berarti orang tahu kitab-kitab suci (Hindu)(C.C Berg, 1932: 257). Dalam hubungan ini, kata Jawa *Pesantren* yang diturunkan dari kata santri dengan dibubuhi awalan *pe-* dan akhiran *-an* berarti sebuah pusat pendidikan Islam tradisional atau sebuah pondok untuk para siswa muslim sebagai model sekolah agama Islam di Jawa (Zaini, 2002: 12-13). Santri dari makna yang sempit diartikan sebagai seorang siswa dari pondok pesantren yang sangat taat menjalankan perintah dan ajaran Islam sehingga kebanyakan mereka tinggal di sekitar masjid atau dekat dengan tempat beribadah.

Kampung Kauman merupakan nama kampung yang selalu ada di tata ruang perkotaan Jawa. Sistem pengaturan kota-kota di Jawa pada umumnya memiliki bentuk yang sama antara lain, adanya alun-alun, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi dan juga adanya masjid besar di kampung tersebut. Disekelilingi masjid dipadati dengan rumah-rumah penduduk yang kemudian disebut sebagai kampung santri (Wijanarka, 2007: 8-9). Masyarakat Kauman

adalah sekelompok orang yang tinggal di dekat masjid mempunyai aturan yang disepakati bersama. Aturan tersebut bersumber dari ajaran Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Kauman. Ditinjau dari pendekatan antropologis, masyarakat Kauman merupakan masyarakat *indogami*, yakni masyarakat yang melakukan perkawinan dengan orang yang ada di kampung yang sama serta tidak ingin mencari dari luar kampung tersebut. Oleh karena sifatnya yang *indogami* maka hubungan yang terbentuk merupakan hubungan pertalian darah. Hierarki jabatan dan status kekayaan tidak mempengaruhi kehidupan karena masyarakat Kauman berdasarkan pada ajaran agama dan pertalian darah yang membuat pergaulan sosial di kalangan masyarakat kuat. (Darban, 2000: 18)

Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat Kauman dapat dikatakan sebagai kaum santri karena dapat diklasifikasikan menggunakan kriterium yang didasarkan pada kelahiran, keturunan, dan pertalian darah yang kuat karena proses *indogami* yang terjadi di Kampung Kauman tersebut. Selain itu, Konsep santri yang secara luas yang menggambarkan masyarakat yang taat pada ajaran Islam serta hidup di daerah perkotaan yang akan menjadi batasan untuk mengidentifikasi kaum santri di Kelurahan Kauman sebagai daerah dengan mayoritas masyarakat beragama muslim serta banyak ditemui pondok pesantren.

Ditinjau dari kehidupan politik masyarakat Santri secara teori memiliki orientasi politik sejalan dengan agama yang sejak ia anut sejak lahir, dan mayoritas kaum santri ini tinggal mengelompok di suatu tempat yang homogen dengan kaumnya. Apabila orientasi politiknya sejalan dengan ideologi dan aspirasi tertentu menunjukkan bahwa perilaku politiknya mengarah kepada kecenderungan

kepada agen politik yang berdasarkan azas agama. Orientasi pemilih tersebut yang selanjutnya akan membentuk pola politik aliran sesuai dengan etnis, budaya, kepercayaan, dan agama yang dianut.

Tabel 1.1 Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2004 di Kauman Kota Semarang

No.	Partai Politik	Perolehan Suara (%)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	29,23
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16,4
3.	Partai Demokrat	13,9
4.	Partai Amanat Nasional	8,76
5.	Partai Golongan Karya	8,6
6.	Partai Keadilan Sejahtera	5,5
7.	Partai Damai Sejahtera	5,13
8.	Partai Persatuan Pembangunan	4,49
9.	Partai Merdeka	3,89
10.	Partai Bulan Bintang	0,91
11.	Partai Nasional Marhaenisme	0,82
12.	Partai Karya Peduli Bangsa	0,82
13.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	0,64

14.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	0,41
15.	Partai Bintang Reformasi	0,36
16.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0,22
17.	Partai Buruh Sosial Demokrat	0,13
18.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	0,09

Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2004 di Kauman Kota Semarang

No.	Partai Politik	Perolehan Suara (%)
23.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	0
24.	Partai Patriot Pancasila	0
Jumlah		100

Berdasarkan data tersebut, hasil pemilu tahun 2004 menempatkan PKB menjadi peraih suara terbanyak sebesar 29,23 %. Kemudian, disusul oleh PDIP dengan perolehan 16,4 %. Data tersebut menunjukkan dominasi PKB di Kauman Kota Semarang. Dominasi PKB masih nampak pada pemilu tahun 2009 dengan hasil sebagai berikut

Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2009 di Kauman Kota Semarang

No.	Partai Politik	Perolehan Suara (%)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	26,45
2.	Partai Demokrat	22,22
3.	Parti Keadilan Sejahtera	12,88
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6,81

5.	Partai Amanat Nasional	6,80
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3,97
7.	Partai Golongan Karya	3,97

Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2009 di Kauman Kota Semarang

No.	Partai Politik	Perolehan Suara (%)
8.	Partai Damai Sejahtera	2,83
9.	Partai Demokrasi Pembaruan	2,75
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2,26
11.	Partai Matahari Bangsa	1,86
12.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	1,45
13.	Partai Bintang Reformasi	1,05
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	0,72
15.	Partai Peduli Rakyat Nasional	0,64
16.	Partai Hati Nurani Rakyat	0,56
17.	Partai Persatuan Daerah	0,56
18.	Partai Kedaulatan	0,40
19.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	0,32
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0,24
21.	Partai Patriot	0,16
22.	Partai Bulan Bintang	0,16
23.	Partai Republika Nusantara	0,16

24.	Partai Demokrasi Kebangsaan	0,16
25.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0,16
26.	Partai Barisan Nasional	0,16
27.	Partai Pemuda Indonesia	0,08
28.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0,08
29.	Partai Pelopor	0,08

Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2009 di Kauman Kota Semarang

30.	Partai Merdeka	0,08
31.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0
32.	Partai Karya Perjuangan	0
33.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0
34.	Partai Indonesia Sejahtera	0
35.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah	0
36.	Partai Serikat Indonesia	0
37.	Partai Buruh	0
38.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0
Jumlah		100

(Sumber: KPU Kota Semarang)

Bagitu pula hasil pemilu legislative tahun 2009 menempatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pemenang pemilu dengan memperoleh suara sebanyak 324 dari keseluruhan suara atau 26,45%. Bahkan hingga tahun 2014, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih mendominasi suara di Kelurahan Kauman dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kecamatan Semarang Tengah.

Tabel 1.3 Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014 di Kauman Kota Semarang

No.	Partai Politik	Perolehan Suara (%)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	37,13
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17,72
3.	Partai Nasional Demokrat	12,40
4.	Partai Amanat Nasional	10,81
5.	Partai Demokrat	7,15
6.	Partai Keadilan Sejahtera	5,56
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4,13
8.	Partai Persatuan Pembangunan	1,6
9.	Partai Golongan Karya	1,51
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0,87
11.	Partai Bulan Bintang	0,23
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0,07

Total	100
-------	-----

(Sumber: Data KPU Kota Semarang Tahun 2016)

Hasil pemilu tahun 2014 menunjukkan dominasi PKB di Kauman masih bertahan. Partai yang keluar sebagai pemenang di kelurahan tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 37,13 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa orientasi pilihan politik masyarakat di Kelurahan Kauman masih kuat dipengaruhi oleh aliran agama mayoritas. Anehnya, keadaan ini terjadi di Kota Semarang dimana dalam sejarahnya sejak tahun 1921 Kota Semarang justru dikenal sebagai daerah abangan karena menjadi pusat kaum merah di Hindia Belanda kala itu. Pada zaman itu Semarang sebagai pusat PKI hingga menjangkau kaum buruh di pesisir kota. Era sekarang, Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah masih terkenal sebagai kandang banteng atau daerah basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (www.tempo.com).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan kelanjutan dari Partai Nahdlatul Ulama sebelum masuk era Orde Baru yang kemudian di Era Orde Baru Nahdlatul Ulama dimanifestasikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan setelah akhirnya Orde Baru runtuh muncul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelum Orde Baru aliran politik yang ada adalah aliran sosialis, komunis, Islam reformis dan Islam konservatif. Sedangkan dikotomi partai politik islam sudah nampak dengan adanya Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) yang dikategorikan sebagai partai islam konservatif sedangkan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin) sebagai partai islam reformis. Setelah era Orde Baru runtuh maka difusi partai islam menjadi terbelah sehingga dikenal dengan adanya santri tradisional yang (PKB dan PPP) dan santri modern (PAN dan PKS).

Namun setelah memasuki era Orde Baru partai politik berbasis massa islam semakin sepi peminat karena pada rezim tersebut muncul adanya Golongan Karya (Golkar) sebagaikomunitas yang mengatasnamakan organisasi masyarakat sebagai kekuatan politik baru. Semenjak itu, Golkar muncul sebagai kekuatan solidaritas sangat mendominasi sejak pemilu 1971 hingga dapat mengalahkan partai-partai yang berhaluan islam yang sebelumnya telah disederhanakan menjadi satu partai islam yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemunduran politik aliran terus terjadi memasuki masa reformasi dengan pemilu yang lebih demokratis. Walaupun banyak bermunculan partai Islam setelah reformasi tetapi partai-partai tersebut tidak dapat mengungguli dominasi partai nasionalis baik di tingkat pusat maupun lokal. Banyak tulisan yang menyatakan kemunduran partai islam setelah dilaksanakan era pemilu demokrasi seperti dalam tulisan Jackline Hicks yang menyatakan bahwa partai Islam kehilangan dukungan karena basis organisasi massa pendukungnya kalah bersaing dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan oleh negara (Jackline Hicks, 2014:1). Partai islam tidak mampu mengakomodasi aspirasi dan agenda islam yang justru lebih mengarah kepada pragmatism dan keberagaman (Anies Baswedan, 2014:689). Disisi lain, Partai nasionalis bergantian memenangkan pemilu dari 1999 hingga 2009, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrat. Bahkan pada pilpres 2009 tidak ada calon yang mewakili partai islam sehingga disebut bahwa politik aliran telah mengalami kemunduran. Menurut Saiful Munjani, politik aliran atau primordial sudah tidak berlaku lagi

dalam pertarungan pemilu presiden dan wakil presiden 2009 karena masyarakat telah dewasa menentukan pilihan politiknya. Faktor primordial tidak punya pengaruh yang berarti, politik aliran sudah mati dan yang membunuh para pemilihnya sendiri. Politik aliran telah mengalami pelemahan (dealiranisasi) karena muncul partai-partai presidensial dalam pemilu 2004, meningkatnya otoritarianisme internal partai, maraknya politik uang, serta mudurnya loyalitas anggota partai terhadap partai politik (Andreas Ufen, 2009:1). Namun hal demikian tidak berlaku di Kampung Kauman yang para pemilihnya masih setia hingga akar rumput sebagai daerah santri dengan orientasi politik yang mengarah pada partai islam khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berbeda dengan Kauman di Yogyakarta yang justru merupakan daerah asal mula perkembangan islam modern yang dewasa ini dikenal dengan aliran muhammadiyah. Awal mula pendirian organisasi Muhammadiyah berpusat di kampung Kauman Yogyakarta. Kampung Kauman ini merupakan kampung tempat K.H. Ahmad Dahlan tinggal. Beberapa sumber telah menjelaskan bahwa pendirian organisasi Muhammadiyah di kampung Kauman ini seolah-olah memberi kesan bahwa K.H. Ahmad Dahlan dan teman-temannya memiliki perhatian yang besar terhadap kampung tempat tinggal mereka (Leny Marlina, 2012:105). Hal ini menunjukkan bahwa afiliasi partai islam di Kuman Yogyakarta mengarah pada partai santri modern (PAN, PKS). Namun, hal ini tidak terjadi di Kauman Semarang sebagai daerah santri tetapi beraliran islam

konservatis yang kemudian menjadi Nahdlatul Ulama (NU) yang dominasi kepartian adalah PKB sebagai partai santri.

Berdasarkan asumsi tersebut membawa pemikiran peneliti untuk menganalisa penyebab dari fenomena dominasi politik aliran di daerah tersebut meskipun di tengah-tengah fakta kemunduran politik aliran di kancah politik nasional. Selain itu, Kampung Kauman letaknya di tengah Kota Semarang yang merupakan basis PDIP yang dikenal sebagai kandang banteng (daerah merah) namun masih ditemukan kampung dengan basis hijau. Hal ini menyangkut mengenai orientasi politik suatu masyarakat sangat ditentukan oleh sosialisasi politik yang pernah diterima dari berbagai agen sosialisasi seperti menurut Clifford Greetz yang menyatakan kuatnya ideologi atau paham kemasyarakatan suatu kelompok sosial terhadap partai politik tertentu. Ideologi islam yang menjadi akar dari budaya politik masyarakat Kelurahan Kauman termanifestasi melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai dominan. Orientasi budaya atau aliran ideologi tertentu dirumuskan pelaku politik menjadi orientasi partai politik, guna membentuk pandangan masyarakat tentang kekuasaan. Selain itu, perbedaan karakteristik Kauman Semarang dengan daerah lainnya yang kemudian menjadi hal yang unik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana pola sosialisasi politik masyarakat Kelurahan Kauman yang akan membentuk orientasi perilaku politik masyarakat setempat sebagai kaum santri sehingga politik aliran melalui Partai kebangkitan Bangsa (PKB) masih sangat kental di daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sosialisasi politik secara luas dipahami sebagai proses transmisi dari budaya politik kepada generasi baru di suatu masyarakat tertentu (Almond dan Verba, 1963). Sosialisasi politik merupakan produk fenomena makro dan mikro yang saling berhubungan. Pertanyaan yang mendasar pada level makro penelitian tentang sosialisasi politik mengenai bagaimana masyarakat politik mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan pendapat-pendapat serta perilaku kepada masyarakat. Sedangkan di level mikro mempertanyakan bagaimana dan mengapa orang-orang menjadi warga negara. Pada level makro sosialisasi politik digunakan sebagai alat yang digunakan masyarakat politik untuk menanamkan norma-norma dan praktek-praktek yang sesuai dengan warga negaranya (Sapiro, 2004:2). Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah mengenai:

1. Bagaimana polakehidupan sosio-religius masyarakat Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah?
2. Apakah politik aliran masih ada pada kaum santri di Kauman Kota Semarang?
3. Apakah perilaku politik kaum santri masih menunjukkan dominasi politik aliran di Kauman Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pola sosialisasi politik masyarakat Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah sebagai kaum *santri*.

2. Untuk memotret pola kehidupan sosio-religius dan sosio-politik masyarakat Kauman terhadap munculnya politik aliran.
3. Untuk mengungkapkan perilaku politik kaum santri yang menunjukkan dominasi politik aliran di Kauman Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi wahana belajar bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan dan diharapkan memberikan sumber pengetahuan dan keilmuan bagi masyarakat Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah dan sekitarnya mengenai sosialisasi politik sebagai internalisasi dari perilaku politik. Selain itu, penelitian ini juga sebagai antitesa dari tulisan-tulisan sebelumnya bahwa politik aliran telah hilang

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah dalam proses sosialisasi politik yang berhubungan dengan ideologi politik sebagai kaum santri untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam memilih orientasi politiknya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai sosialisasi politik yang dilakukan oleh Im Soimah yang berjudul “Peran Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Politik Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Indramayu” Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut berfokus pada peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik dan orientasi politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Indramayu. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik (a) memberikan informasi mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat (b) memberikan pertimbangan kepada pemilih pemula dalam menentukan pilihan serta (c) memberikan motivasi.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang berjudul “Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto oleh Gede Indra Pramana dari Pascasarjana Politik Pemerintahan UGM dengan menggunakan metode studi literature. Fokus dari penelitian ini adalah pemahaman terhadap *social cleavages* atas bagaimana struktur masyarakat menjadi lokus kemunculan partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan di tingkat lokal menggambarkan pola pilihan di tingkat nasional. Isu dan kampanye di tingkat nasional dapat mempengaruhi pola pilihan di tingkat lokal.

Dari penelitian diatas terlihat perbedaan dengan penelitian ini yakni ditinjau dari lokasi penelitian bahwa penelitian terdahulu yang disebutkan

bersitus di Kabupaten Indramayu dan Bali sedangkan penelitian ini mengambil situs di Kelurahan Kauman Kota Semarang. Ditinjau dari fokus penelitian, penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan pola sosialisasi politik di Kelurahan Kauman Kota Semarang yang menentukan orientasi serta pilihan terhadap partai politik sehingga memperkuat keberadaan politik aliran. Penelitian ini tidak mendalami peran agen sosialisasi maupun pemetaan aliran politik kepartain seperti penelitian terdahulu.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1. Sosialisasi Politik

1.5.2.1.1 Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Michael Rush dan Philip Althoff 1995). Dalam pembuatan keputusan politik dalam masyarakat selalu melibatkan ineraksi antar masyarakat baik interaksi secara vertical maupun horizontal.

- . Interaksi itu yang kemudian akan memunculkan berbagai jenis perilaku yang berhubungan dengan berbagai pihak yang dilakukan oleh individu atau instansi (Ambo Upe:2, 2008). Karena itu, ilmu politik merupakan ilmu yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikaji dari berbagai perspektif. Salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisis politik adalah sosialisasi politik.

Kajian sosialisasi politik sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan disiplin ilmu sosial dan ilmu politik. Hal ini yang dipahami sebagai sosialisasi politik merupakan jembatan yang menghubungkan konsep sosial dan politik dalam masyarakat. Ruang jembatan tersebut secara umum ditempati dengan titik-titik perpaduan dalam hal teori, konsep, metodologi, maupun pendekatan yang digunakan.

Dimensi atau kajian ruang lingkup sosialisasi politik perlu dijabarkan untuk melandasi penelitian menggunakan konsep sosialisasi politik. Perspektif sosialisasi politik digunakan untuk memotret dan menjelajahi kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Sosialisasi politik seperti yang dipahami sebelumnya sebagai pola yang menjelaskan kehidupan masyarakat di suatu tempat. Oleh karena itu, pengertian sosialisasi politik selalu dipahami sebagai keseluruhan proses politik yang ada di masyarakat. Dengan demikian, maka perlu dipahami pengertian dari sosialisasi politik menurut beberapa ahli sebagai berikut, yaitu.

- a. "...Pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu berbagai ketrampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif dan sikap yang perlu untuk menampilkan peranan yang sekarang atau sedang diantisipasi... (dan terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia norma dan peranan-peranan baru masih harus dipelajari." (David F. Aberta, 1961)
- b. "... Segegap proses pada individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku aktualnya yang dibatasi dalam jajaran yang menjadi kebiasaan dan biasa diterima olehnya sesuai dari standar dari kelompoknya." (Irvin L. Child)
- c. "... Komunikasi dengan manusia lainnya dan mempelajari dari mereka , dengan siapa individu ini bertahap memasuki beberapa jenis relasi umum." (S.N. Einsendstandt, 1956)

Bertolak dari definisi ini Rush and Athoff mengatakan sosialisasi cukup signifikan dalam politik. Keduanya berpendapat bahwa pentingnya sosialisasi kaitannya dengan politik adalah:

Pertama: seluas manakah sosialisasi itu merupakan proses pelestarian yang sistematis? Hal ini penting sekali untuk menguji hubungan antara sosialisasi dan perubahan sosial; atau istilah kaum fungsional, sebagai pemeliharaan sistem.

Kedua: adalah berkaitan dengan keluasaan, yang mencakup tingkah laku, baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diakses yang dipelajari dan juga bahwa berupa intruksi(Rush dan Althoff: 30-33, 1986)

Hubungan majemuk akan terjadi manakala terjadi proses keterlibatan dalam pengambilan sikap politik. Pendekatan psikokultural sebelumnya terhadap subyek menjelaskan adanya hubungan sederhana dengan sosialisasi politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba berpendapat ada tiga anggapan yang biasanya dibuat yaitu:

1. Pengalaman sosialisasi yang akan mempengaruhi tingkah laku politik dikemudian hari yang terjadi sebelumnya dalam kehidupan.
2. Pengalaman ini bukan pengalaman yang bersifat politik , tetapi mengalami berbagai konsekuensi politik laten yaitu yang tidak dimaksudkan melahirkan dampak tersebut tidak terorganisir adanya, dan

3. Proses sosialisasi selalu bersifat unidireksional: dimana pengalaman-pengalaman mendasar di dalam keluarga mempunyai pengaruh penting terhadap struktur sekunder politik tetapi sebaliknya tidak dipengaruhi oleh politik (Almond dan Verba: 325-326, 1990).

Dengan demikian, pengertian sosialisasi politik tidak bisa dilepaskan dari pengertian-pengertian sosialisasi diatas. Misalkan, dikatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses yang panjang dan rumit yang dilalui individu sebagai jalan untuk menyatukan pengalaman dan sikap politik dari individu dalam keterlibatan politik. Sikap-sikap dan perilaku politik yang terbentuk dari keterlibatan itu akan cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Secara lebih singkat, sosialisasi politik dipahami sebagai proses membentuk sikap dan orientasi politik individu. Sikap dan orientasi individu dari sosialisasi politik inilah yang kemudian akan menentukan tingkat partisipasi dan mempengaruhi lingkupan kehidupan individu.

Melalui proses sosialisasi politik inilah, menurut Gabriel A. Almond, seperti dikutip Arifin Rahman, mengemukakan bahwa sosialisasi politik menunjuk pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik pada generasi berikutnya (Arifin Rahman: 67, 2001). Sehingga yang dimaksud sosialisasi dalam hal ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh

seseorang sebagai komunikator, yang menyampaikan ide, gagasan, pesan pengalaman, dan nilai-nilai yang dihasilkan dari lingkungan dan sarana-sarana lain yang berada di sekitar komunikan (orang yang tersampaikan pesan tersebut). Proses ini terjadi sepanjang hidupnya yang diperoleh melalui pendidikan formal dan informal maupun melalui kontak, bersinggungan dan pengalaman sehari-hari yang dimulai dari kehidupan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat.

Namun, lain halnya pendapat yang didefinisikan oleh Richard E. Dawson dan kawan-kawan seperti dikutip Haryanto, mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi politik itu dapat dipandang sebagai suatu pewarisan nilai-nilai, pengetahuan, dan pandangan-pandangan politik dari orangtua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa (Haryanto: 32, 1987). Nilai-nilai dan pengalaman individu yang terbentuk akan dipengerahui oleh agen sosialisasi politik seperti teman, guru, dan keluarga. Oleh karena itu, sosialisasi politik sangat ditentukan oleh media atau sarana komunikator dalam menyampaikan pesan dan nilai kepada komunikan.

Berdasarkan bentuk dan metode penyampaian pesan politik, sosialisasi politik dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik (Ambo Upe: 10-11, 2008). Pendidikan politik dipahami sebagai proses dialogis antara komunikator dan komunikan. Melalui metode penyampaian

pesan ini, anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, simbol politik, norma-norma dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, maupun melalui pendidikan non-formal lainnya, baik melalui kegiatan kursus, diskusi, pelatihan yang serba disiplin dan ketat, bagi partai politik melakukan hal ini dalam sistem totaliter. Sedangkan yang dimaksud dengan indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi anggota masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan symbol-simbol yang dianggap mereka sebagai suatu hal yang baik dan ideal. Secara konkret, metode ini dilaksanakan melalui forum pengarahan yang penuh dengan *pressure* secara psikologis.

Jenis Sosialisasi Politik Dari metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua ; pendidikan politik dan indoktrinasi politik (Ramlan Surbakti, 1992:117).

a. Pendidikan politik Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dalam sistem politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai, norma dan simbol-simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus, latihan

kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan partai politik, dalam sistem politik demikian dapat melaksanakan proses pendidikan politik.

- b. Indoktrinasi politik Yang dimaksud indoktrinasi ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum penguasa yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik.

Dalam kehidupan politik, sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam menentukan perilaku partisipasi politik individu yang bertanggung jawab. Dalam hal ini sosialisasi merupakan proses pendidikan atau membudayakan manusia-manusia politik. Sosialisasi politik dimulai sejak dini mulai dari agen terkecil oleh keluarga, sekolah, hingga media massa sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik. Dengan demikian, konsep sosialisasi politik itu sendiri adalah proses pembelajaran dari wujud pengenalan terhadap negara, kekuasaan, dan symbol-simbol negara yang disampaikan kepada individu melalui agen-agen sosialisasi politik tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan proses sosialisasi politik adalah proses pembelajaran atau

penerimaan nilai-nilai atau sikap inividu terhadap orientasi politiknya dalam suatu lingkungan. Proses ini berlangsung sepanjang hidupnya yang dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal yang ada dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan masyarakat dalam lingkungannya.

1.5.2.1.2 Tipe Sosialisasi Politik

Tipe sosialisasi politik yang dimaksud adalah bagaimana cara atau mekanisme sosialisasi politik berlangsung. Oleh karena itu, tipe sosialisasi politik dapat disebut pula dengan mekanisme politik. Ada dua tipe sosialisasi politik, yaitu tidak langsung dan langsung. Ada dua tipe sosialisasi politik yaitu langsung dan tidak langsung (Ijwara, 1995 : 15)

a. Sosialisasi politik langsung berlangsung dalam satu tahap saja, yaitu bahwa hal-hal yang diorientasikan dan ditranmisikan adalah hal-hal yang bersifat politik saja. Sosialisasi politik langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut :

1) Peniruan Perilaku (imitasi)

Proses menyerap atau mendapatkan orientasi politik dengan cara meniru orang lain. Yang ditiru bukan hanya pandangan politik, tetapi juga sikap-sikap politik, keyakinan politik, harapan mengenal politik, tingkah laku politik, serta ketrampilan dalam berpolitik.

2) Sosialisasi Antisipatori

Sosialisai politik dengan cara belajar bersikap dan berperilaku seperti tokoh politik yang diidealkan.

3) Pendidikan Politik

Sosialisasi politik melalui pendidikan politik adalah upaya yang secara sadar dan sengaja serta direncanakan untuk menyampaikan, menanamkan, dan memberikan pelajaran kepada anak untuk memiliki orientasi politik tertentu. Pendidikan politik bisa dilakukan di Sekolah, organisasi, partai politik, media massa, diskusi politik, serta forum-forum politik.

4) Pengalaman Politik

Pengalaman politik adalah belajar langsung dalam kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik. Terlibat langsung dalam kegiatan partai politik.

- b. Sosialisasi politik tidak langsung, Sosialisasi politik tidak langsung adalah warga negara pada mulanya berorientasi pada hal-hal yang bukan politik (non politik), namun kemudian mempengaruhinya untuk memiliki orientasi politik. Terdapat dua tahap dalam sosialisasi politik tidak langsung yaitu tahap pertama berorientasi pada non politik, tahap kedua digunakan untuk orientasi pada politik. Sosialisai politik secara tidak langsung ini dapat dilakukan melalui tiga cara

1) Pengalihan hubungan antar individu (Interpersonal)

Hubungan antar individu yang pada mulanya tidak berkaitan dengan politik, namun nantinya akan berpengaruh ketika berhubungan atau berorientasi dengan kehidupan politik. Contohnya, hubungan mahasiswa dengan dosen, nantinya akan membentuk siswa manakala ia bertemu dengan walikota/bupati.

2) Magang

Magang merupakan bentuk aktivitas sebagai sarana belajar. Magang di tempat-tempat tertentu atau orientasi non-politik, nantinya akan mempengaruhi seseorang ketika berhubungan dengan politik. Contohnya, mahasiswa ikut organisasi kemahasiswaan, dalam organisasi tersebut mereka belajar mengenal rapat, melakukan voting, dan membuat keputusan. Kegiatan ini akan sangat membantu manakala mahasiswa nanti benar-benar terjun ke dalam dunia politik praktis.

3) Generalisasi

Kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini selama ini yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan politik dapat mempengaruhi seseorang untuk berorientasi pada obyek politik tertentu. Contohnya, seseorang yang memiliki kepercayaan bahwa semua orang pada dasarnya baik, maka kepercayaan ini akan menjadikan ia berprasangka baik terhadap

semua pejabat negara. Sebaliknya, jika seseorang berpendapat bahwa semua orang pada dasarnya buruk, ia akan hati-hati manakala bertemu dengan pejabat.

Jadi kepercayaan atau nilai-nilai yang diyakini digeneralisasikan kepada kehidupan politik. *Sosialisasi politik tidak langsung*, seperti yang digambarkan Gabriel A. Almond, 1960: pertama-tama melibatkan anak-anak yang mula-mula dalam keluarganya. Dalam pandangan ini, sikap politik terdapat pada pembentukan karakter berdasarkan pengalaman seseorang di dalam keluarga dan kelompok tertentu melalui proteksi karakter. Pemahaman psikokultural terhadap sosialisasi ini telah diusulkan oleh antropologi budaya yang dipengaruhi oleh penekanan psikoanalisis tentang peranan kritik di dalam sebuah hubungan keluarga terhadap sosialisasi anak.

Tidak diragukan lagi bahwa karakter terbentuk melalui pengalaman dalam keluarga, serta karakter ini memengaruhi perilaku. Ada dua sarana belajar, yaitu dalam keluarga, tetangga dan sekolah, yang tidak bersifat politik tetapi mengembangkan orientasi-orientasi sikap tertentu. Orientasi ini melibatkan sikap-sikap yang mengarah kepada kerjasama lainnya, kepercayaan terhadap masyarakat dan seterusnya. Seorang anak mengembangkan sikap-sikap yang mengarah kepada otoritas dalam awal kehidupan yang mentrasfer pada obyek-obyek politik. Easton dan Dennis mengutarakan ada empat tahap dari proses

sosialisasi politik dari anak-anak, yaitu sebagai berikut: (Rush dan Althoff:59-60, 1986)

1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orangtua anak, presiden, polisi.
2. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
4. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

Bentuk kedua belajar politik secara tidak langsung “*aprenticeship*” diusulkan oleh Dawson dan Prewitt, (1969).Petunjuk mereka adalah bahwa banyak pengalaman kehidupan non-politik mengajarkan sikap-sikap, nilai-nilai dan ketrampilan yang mendasar adalah langsung berguna ketika seorang anak memasuki kehidupan politik.Dari beraneka ragam pengalaman non-politik yang kemudian bertalian dengan ketrampilan- ketrampilan dan *insight – insight*(pemahaman situasi – situasi sekarang) yang sangat berharga untuk menemukan caranya dalam dunia politik (Stone, 1963:54)

Sosialisasi politik langsung, bagaimana para agen mentransmisikan elemen-elemen dari sosialisasi politik sangat bervariasi; dan model tersebut dahulu mensugestikan tiga mekanisme: imitasi (peniruan), intruksi, dan motivasi. Robert Le Vine mensugestikan bahwa ketiga hal tersebut adalah mekanisme dari sosialisasi politik pada masa anak-anak (Rush dan Althoff:40-41, 1986).

Imitasi merupakan peniruan (*copy*) terhadap tingkah laku individu-individu lain, merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak, walaupun sebenarnya tidak dibatasi pada tingkah laku kanak-kanak saja. Namun demikian imitasi murni lebih banyak terdapat di kalangan anak-anak, pada masa remaja dan orang dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula baik pada orangtua.

Intruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran atau penjelasan diri baik secara formal (di sekolah), informal (pendidikan di keluarga) maupun dalam bentuk nonformal (diskusi-diskusi kelompok, organisasi, dll) mengenai tingkah laku politik.

Motivasi, merupakan mekanisme proses sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman individu pada umumnya yang secara

langsung mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman-pengalamannya mengenai tindakan-tindakan yang sesuai dengan sikap-sikap dan pendapatnya sendiri.

1.5.2.1.3 Agen Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik tidak dapat semata-mata hanya dilakukan oleh seorang individu secara pribadi melainkan sosialisasi merupakan serangkaian proses yang harus dilalui oleh seorang individu dalam kehidupan sosial berkelompok. Oleh karena itu dalam proses sosialisasi membutuhkan pihak-pihak sebagai perantara penyerapan nilai, budaya, dan ideologi kepada generasi berikutnya. Perantara proses penyerapan nilai-nilai politik itu dinamakan agen sosialisasi politik. Seperti telah disinggung di atas, agen sosialisasi politik meliputi keluarga,sekolah,teman sebaya atau teman sejawat (*peer group*), media massa, dan organisasi yang ada dalam masyarakat (Sunarto,2004:21). Dari kutipan di atas dapat diuraikan bahwa agen sosialisasi politik merupakan perantara penyerapan nilai-nilai politik kepada seseorang,berikut ini adalah agen-agen sosialisasi politik:

1.Kelurga

Keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang sangatpotensial untuk mempengaruhi setiap individu. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama

bagi setiap individu. Dikatakan sebagai lingkungan yang pertama karena individu semenjak lahir dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dan sebelum berkenalan dengan berbagai nilai dalam masyarakat, individu yang bersangkutan telah mengenal nilai-nilai dalam keluarga. Begitu juga keluarga merupakan lingkungan yang utama, karena individu umumnya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian bagaimana situasi dan kondisi keluarga akan sangat mempengaruhi perkembangan individu. Begitu juga dalam kaitannya dengan kehidupan politik. Seberapa besar nilai-nilai politik itu ada dalam kehidupan keluarga akan sangat menentukan serapan nilai-nilai itu dalam diri individu. Pola hubungan dalam keluarga yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi misalnya, akan sangat mempengaruhi perilaku demokratis dari setiap individu dalam keluarga yang bersangkutan, begitu juga sebaliknya. Persoalan sosialisasi politik di Indonesia dalam kaitan dengan keberadaan keluarga adalah bahwa sebagian besar keluarga di Indonesia kondisi sosial ekonominya masih minim, sehingga mereka harus mencurahkan perhatian utamanya pada masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian maka perhatian terhadap kehidupan politik masih sangat kurang, bahkan cenderung apatis terhadap kehidupan politik. Dalam kondisi yang demikian maka penyerapan nilai-nilai politik dari lingkungan keluarga cenderung sangat kurang. Dengan

kata lain masih sulit diharapkan peranan keluarga dalam penanaman kesadaran politik dalam keluarga tersebut

2. Sekolah

Sekolah juga merupakan agen sosialisasi politik. Lewat pelajaran sekolah peserta didik sekaligus warga negara mendapatkan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sekolah pun diperkenalkan symbol - simbol kehidupan berbangsa seperti lambang Negara, gambar Presiden, gambar pahlawan, peta wilayah Negara, dan sebagainya, dengan maksud agar siswa sebagai warga negara sadar akan adanya komunitas kebangsaan, adanya organisasi bersama yang disebut Negara. Di samping itu lewat pelajaran di sekolah ditanamkan pemahaman tentang konstitusi, demokrasi, pemerintahan, dan sebagainya yang pada akhirnya diharapkan muncul kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sosialisasi politik di sekolah berlangsung melalui proses konseptual, sistematis dan terencana, karena diikat oleh ketentuan kurikulum, dilaksanakan dalam satuan waktu tertentu, dan melalui proses pembelajaran yang efektif.

3. Teman Sejawat / Teman Sebaya (*Peer Group*)

Seorang anak cenderung berteman dengan anak lain yang sebaya. Orang dewasa yang telah bekerja juga memiliki teman sejawat, yaitu teman-teman yang bekerja pada instansi yang sama ataupun menggeluti profesi yang sama. Sebagian waktu yang dimilikinya digunakan untuk berkumpul dengan teman sebaya atau rekan sejawat. Di antara orang-orang tersebut terjalin hubungan yang relative dekat dan sering berdiskusi, bertukar pikiran atau tukar pengalaman satu sama lain. Dalam hubungan seperti itulah terjadi penyerapan nilai-nilai kehidupan, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai politik. Sikap seseorang terhadap obyek politik tertentu sering dipengaruhi oleh teman-teman sebaya atau rekan sejawat. Pilihan terhadap partai politik atau calon presiden dalam suatu pemilihan umum misalnya, sering terpengaruh oleh teman-teman sebayanya. Semua itu adalah bagian dari proses sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang terjadi antara teman sebaya atau rekan sejawat merupakan sosialisasi politik yang bersifat horizontal.

4. Media Massa

Media massa merupakan sarana komunikasi politik. Melalui media massa pesan-pesan politik dapat tersampaikan dari seseorang kepada orang lain, dari pemerintah kepada rakyat, atau dari rakyat kepada pemerintah. Media massa juga dapat dilihat sebagai sarana

pendidikan politik. Sebagai sarana pendidikan politik, media massa itu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Melalui media massa rakyat memperoleh pemahaman tentang proses politik yang terjadi dalam sistem politiknya. Dengan perannya yang demikian maka keberadaan media massa sebagai sarana sosialisasi politik merupakan sesuatu mudah dipahami.

5. Organisasi dalam Masyarakat

Melalui organisasi yang ada dalam masyarakat, anggota berlatih untuk membangun kehidupan bersama dengan anggota-anggota lain, dibiasakan dengan kegiatan rapat, memilih pemimpin, mengambil keputusan, membangun kesepakatan-kesepakatan, menanggapi berbagai pendapat yang berbeda satu sama lain, yang semua itu mengandung nilai-nilai politik yang sangat bermanfaat. Orang yang banyak berkecimpung dalam organisasi cenderung tertarik pada masalah-masalah dan kegiatan-kegiatan yang berbau politik. Organisasi dalam masyarakat juga dapat menjadi sarana rekrutmen dan selektif kepemimpinan politik.

1.5.2.1.4 Pola Sosialisasi Politik

Pembahasan mengenai sosialisasi politik tidak terlepas dari pola yang akan membentuk kehidupan politik suatu masyarakat. Secara umum pola sosialisasi dibedakan menjadi dua yakni pola sosialisasi represif dan pola

sosialisasi partisipatif. Pola sosialisasi represif merujuk pada sosialisasi yang dilakukan melalui cara-cara paksaan dalam menyampaikan nilai-nilai politik. Dalam hal ini kepatuhan erat hubungannya dengan hukuman dan imbalan. Sedangkan pola sosialisasi partisipatif menekankan pada sosialisasi dengan menggunakan cara yang lebih demokratis dalam menyampaikan nilai-nilai politik.

Menurut Jaeger (dalam Sunarti Kamanto 2000,: 33), Membagi dua pola sosialisasi antara lain; Sosialisasi represif (*repressive socialization*) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Dalam pola sosialisasi represif, juga menekankan pada kepatuhan anak dan orang tua. Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah; penekanan titik berat sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai *significant other*. Pola antara orang tua dan anak dalam hal ini juga dapat terjadi di lingkungan masyarakat dimana tokoh masyarakat mengambil peran orang tua seperti dalam keluarga. Sebaliknya masyarakat berperan sebagai pihak yang dituntut kepatuhannya sama dengan peran anak dalam keluarga. Sedangkan dalam Pola Sosialisasi yang partisipatoris (*participatory socialization*) merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi

bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak, keluarga menjadi *generalized other*.

Sedangkan menurut Elizabeth B. Hurlock yang lebih menanamkan kedisiplinan pihak tertentu, Pola Sosialisasi (Soe'oad dalam Ihromi, 1999 : 51) dibagi menjadi tiga macam, antara lain:

1. Pola Sosialisasi Otoriter, dalam pola sosialisasi ini pihak yang memberikan kepatuhan dalam hal ini tokoh masyarakat memiliki kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang kaku dalam membina pihak yang harus patuh. Setiap pelanggaran dikenakan hukuman. Sedikit sekali atau tidak pernah ada pujian atau tanda-tanda yang membenarkan tingkah laku pihak yang patuh apabila mereka melaksanakan aturan tersebut. Tingkah laku dikekang secara kaku dan tidak ada kebebasan berbuat kecuali, perbuatan yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Tokoh masyarakat tidak mendorong masyarakatnya untuk mengambil keputusan sendiri atas perbuatannya, tetapi menentukan bagaimana harus berbuat. Dengan demikian, masyarakat pada umumnya tidak memperoleh kesempatan untuk mengendalikan perbuatan-perbuatannya.
2. Pola Sosialisasi Demokratis, tokoh menggunakan diskusi, penjelasan dan alasan-alasan yang membantu masyarakat sebagai klien agar mengerti mengapa ia diminta untuk mematuhi suatu aturan. Penekanannya pada aspek pendidikan ketimbang aspek hukuman. Hukuman tidak pernah kasar

dan hanya diberikan apabila ada kesengajaan menolak perbuatan yang harus yang harus dilakukan atau dengan sengaja membuat suasana menjadi tidak kondusif.. Apabila ada perbuatan sesuai dengan apa yang patut dilakukan, akan ada pujian yang diberikan.

3. Pola Sosialisasi Permisif, pola sosialisasi ini berusaha membiarkan atau mengizinkan setiap tingkah laku klien, dan tidak pernah ada hukuman kepada pihak yang tidak patuh. Pola ini, ditandai dengan sikap masyarakat yang dibiarkan mencari dan menemukan sendiri tata cara yang memberi batasan-batasan dari tingkah lakunya. Pada saat terjadi hal, yang berlebihan barulah dilakukan tindakan tertentu. Pada pola ini pengawasan menjadi sangat longgar.

1.5.2.2. Kaum Santri di kalangan masyarakat Islam Jawa

Istilah santri mula-mula dan biasanya memang dipakai untuk menyebut murid yang mengikuti pendidikan islam, merupakan perubahan bentuk dari kata India *Shastri* berarti orang yang tahu kitab-kitab suci (Hindu)(Berg:257,1932), seorang ahli kitab suci . Adapun kata *shastra* yang berarti kitab suci, atau karya keagamaan atau karya ilmiah(Chatur Verdi:267, 1970). Dalam hubungan ini *Pesantren* yang diturunkan dari kata santri dengan dibubuhi awalan *pe-* dan akhiran *-an* berarti sebuah pusat pendidikan islam tradisional atau sebuah pondok untuk para siswa muslim sebagai model sekolah agama Islam di Jawa (Zaini, 2002: 12-13). Sejauh

kita memperhatikan kehidupan suatu komunitas dapat diketahui bahwa stratifikasi suatu masyarakat mungkin tampak tajam, pasti, dan mantap. Bila kriterium pembagian itu didasarkan atas keturunan, kelahiran atau pertalian darah, maka keberadaan kelas cenderung menjadi pasti. Tetapi bila kriterium itu berasal dari pemilahan pekerjaan atau kemampuan perseorangan, maka pembagian itu cenderung menjadi kurang tegas (Zaini, 2002: 207-211). Satu istilah untuk santri sebagai lazimnya digunakan oleh orang Jawa ialah kata *putihan*, yang diturunkan dari pangkal kata *putih* dengan akhiran *-an*. Istilah ini agaknya dipakai karena pakaian putih yang mereka kenakan waktu bersholat. Masih berhubungan dengan pengertian putih, ada di desa di sekitar keraton Surakarta yang disebut *desa keputihan* atau *desa mutihan* yang berarti desa putih (Zaini Muhtarom:13). Para penghuninya sebagian besar adalah orang yang taat beragama (Bachtiar:109, 1973), sedangkan dalam keraton para santri priyayi disebut *abdi dalem pametakan* atau pegawai putih seri raja (*Abdi Dalem pametakan* secara harfiah berarti abdi putih dalam kediaman keluarga bangsawan. Kata “*abdi*” berasal dari *abd* (abdi, budak), kata *dalem* berarti kediaman bangsawan feodal, sedangkan kata *pemetakan*, yang dibentuk dari pangkal kata *petak* berarti putih).

1.5.2.3 Politik aliran (Political Cleavages)

Setelah jatuhnya rezim Suharto, banyak partai bermunculan sebagai bentuk kebebasan. Sekurang-kurangnya ada 200 partai politik baru yang

bermunculan, namun hanya 48 di antaranya diizinkan untuk berpartisipasi dalam Pemilu Juni 1999, pemilihan bebas pertama sejak 1955. Jumlah pemilih yang tinggi kala itu sehingga meningkatkan antusias masyarakat dan partisipasi politik. Oleh karena itu, tak heran sistem partai baru yang muncul sebagai hasil pemilihan mengingatkan dari tahun 1950-an ketika Indonesia mengalami parlementer demokrasi untuk pertama kalinya. Karena kesamaan ini, kisaran Para ilmuwan merujuk pada aliran (secara harfiah 'aliran') pendekatan Clifford Geertz. Aliran ini merupakan keseluruhan konsep yang dis'Aliran' ini menyusun keseluruhan sistem partai pada tahun 1950an karena berakar asosiasi khusus disekitar partai politik yang mewakili pandangan dunia dan sosial yang spesifik.

Meski sistem partai di Indonesia nampaknya stabil perpecahan dalam jangka waktu yang panjang - dinamika politik partai masih ditandai oleh aliran - dalam beberapa tahun terakhir, kegunaan aliran Pendekatan semakin dipertanyakan. Aliran politik telah kehilangan banyak dari signifikansinya dan telah kembali muncul dalam bentuk yang sangat berbeda sejak 1998. Pihak bukan agregasi kepentingan 'organik', tapi memang begitu ditandai dengan segala macam kekurangan. Kebanyakan dari mereka ditunggangi konflik internal, pembiayaan mereka sering teduh, platform mereka Para elit yang samar dan partai cenderung memonopoli pengambilan keputusan. Jelas, Di luar loyalitas dan ideologi lama, kekuatan lain sedang berjalan. Identifikasi

dengan partai tertentu oleh pemilih tertentu tetap ada, tapi semen ideologis serta basis organisasi telah terkikis.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa partai masih asing sebagai simbol pemilih dan pendekatan aliran yang dimodifikasi masih memiliki analisis nilai. Tapi seseorang bisa dengan jelas menyaksikan melemahnya aliran (dealiranisasi). Pelonggaran keterikatan pada partai politik, yang diwujudkan antara lain dengan menurunnya angka keanggotaan dan meningkatnya jumlah ayunan pemilih, dijelaskan dalam literatur tentang partai-partai Barat sebagai 'dealignment'. Proses seperti itu juga telah terjadi di Indonesia.

Bagian pertama dari tulisan ini membantu pembaca untuk memahami konsep tersebut aliran yang ditafsirkan di tahun 1950an, karena istilah ini sekarang sering terjadi digunakan membingungkan. Ini meletakkan dasar untuk perbandingan pihak - pihak dalam 1950an dengan masa pasca-Soeharto. Apalagi bagian ini melukis beberapa aspek penting aliran dan evolusi partai politik sampai menyajikan. Kemudian, perdebatan arus saat ini akan digariskan sebelum melanjutkan dengan deskripsi indikasi penanganan partai di Indonesia sejak tahun 1998, yaitu bangkitnya presiden atau presiden partai, menumbuhkan otoritarianisme intra-partai, prevalensi politik uang', kurangnya platform politik yang berarti, loyalitas yang lemah terhadap partai, kartelisasi dan kebangkitan elit lokal baru. Dalam Kesimpulan, alasan utama untuk dealignment, yakni reformasi formal institusi dan faktor sosial, bergeser

dalam hubungan antara modal dan kelas politik, mengubah pola pendidikan, dan meningkatnya kepentingan dari media massa, akan digariskan.

Pada tahun 1950 dan 1960an, akar ideologis partai politik yang mendalam dikonseptualisasikan oleh kaum Indonesia dengan pendekatan aliran. Clifford Geertz (1960) pertama menggariskan model ini dalam karya utamanya, *The Religion of Java* Diferensiasinya yang terkenal antara abangan (sinkretis menekankan keyakinan animistik), santri (pengikut Islam yang lebih murni) dan priyayi (yang kebanyakan dipengaruhi oleh budaya aristokrat Hindu) memiliki sifat yang langgeng dampak pada studi lebih lanjut di Jawa. Untuk tujuan menganalisis partai politik di tahun 1950an, memang jauh lebih praktismengacu pada interpretasi yang sedikit berbeda yang dibuat oleh Geertz sendiri di Pedang dan Pangeran, di mana dia mengkonsepkan empat partai terbesar sebagai fokus organisasi aliran: 'Begitu juga dengan organisasi politiknya, masing-masing pihak telah terhubung. Dengan itu, secara formal atau informal, klub wanita, pemuda dan pelajar kelompok, serikat pekerja, organisasi petani, asosiasi amal, sekolah swasta, masyarakat religius atau filosofis, asosiasi veteran, klub tabungan, dan sebagainya, yang berfungsi untuk mengikatnya ke sistem sosial lokal Oleh karena itu, masing-masing pihak dengan agregasinya Asosiasi khusus menyediakan kerangka umum di mana Berbagai kegiatan sosial dapat diatur, dan juga keseluruhannya Dasar pemikiran ideologis untuk memberi aktivitas itu titik dan arah. karena

oportunisme priyayi berhadapan dengan Belanda. Islam ide modernis mulai merasuki pemikiran pedagang di kota. Sarekat Dagang Islam dan reformis Organisasi Muslim Muhammadiyah didirikan. Gantinya, Nahdatul Ulama tradisional (NU, Renaissance of Muslim Scholars) muncul pada tahun 1926. Strain lain dalam gerakan antikolonial adalah nasionalisme sekuler ala Sukarno, dan komunisme. Kapan setelah kemerdekaan hubungan kekuasaan antara elit baru harus Ditata ulang, partai-partai yang sebelumnya ilegal serta religius yang agung organisasi dengan jaringan luas mereka dapat memobilisasi pengikut mereka masing-masing.

Aliran didasarkan pada bentuk lama integrasi sosial dengan bersamaan mereka pandangan dunia, namun partai politik dan organisasi terkait tidak akan membentuk pola hubungan antar-aliran yang relatif stabil sampai tahun 1950an Pemilu tahun 1955, khususnya berkampanye panjang periode, diperkuat identifikasi dengan aliran dan sering mengandung pahit konflik bahkan di desa-desa terpencil: misalnya antara Partai Nasional Sekularis Indonesia (PNI, Partai Nasional Indonesia) dan salehpengikut Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Konsultatif Dewan Muslim Indonesia). Feith mencatat bahwa Menurut Hindley (1970, :42 ff), serangan terhadap PKI pada bulan Oktober 1965 dipimpin oleh perwira militer, santri tradisional dan modernis, Orang Kristen dan 'kelompok tipe PSI', terdiri dari sekuler, orang yang sangat kebarat-baratan, biasanya berbasis di perkotaan. Protestan

dan individu

Pendukung PNI dibantu, tapi bukan organisasi nasional mereka. Tentara berdiri terpisah dari kelompok sipil berbasis aliran, Meskipun banyak perwira termasuk sektor modernis non-santrimasyarakat (Hindley, 1968,:27) KAP-Gestapu anti-komunis (Front Aksi untuk Crushing Gestapu) 9 dibentuk oleh mahasiswa dan pemuda organisasi santri, dan Katolik. Mereka didukung oleh pimpinan pusat tentara dan mulai mengorganisir demonstrasi publik (Hindley, 1970,: 41). Yang lain Aksi depan yang didirikan pada akhir Oktober 1965 adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI, Ftont Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia) yang sebagian besar pemimpinnya berasal dari Islam (HMI dan PMII) dan Organisasi mahasiswa Kristen (PMKRI) meskipun dukungan santri adalah kunci untuk melawan PKI dan meminggirkan Sukarno pada 1965/66, dalam politik Orde Baru Islam sudah lama dikecualikan dari kekuasaan. Elit negara baru terdiri dari petugas, birokrat dan pengusaha, yang sebagian besar berada baik orang Kristen maupun abangan. Rezim bahkan mencoba untuk membasmi atau setidaknya melemahkan aliran demi mencapai cita-cita masyarakat terdiri dari 'kelompok fungsional'. Kelompok-kelompok ini secara teoritis ada di bawah atap sebuah 'negara keluarga' (negara kekeluargaan) tanpa konflik. Menurut model negara integralis, kelas sosial tidak ada (Bourchier, 1996). Begitu juga alirannya tidak sesuai dengan model ini bukan partai politik dengan massa berafiliasi masing-masing organisasi yang mengartikulasikan kepentingan dan

pandangan dunia tertentu. Dengan demikian, rezim mencoba dari awal untuk menggabungkan dan mengendalikan organisasi sosial. Alih-alih membiarkan berbagai serikat pekerja, petani 'asosiasi, dll untuk bersaing satu sama lain, organisasi ini sangat bersatu. Sejalan dengan ideologi ini, elit rezim Orde Baru mulai depolitisasi masyarakat, untuk memusatkan administrasi dan ke merampingkan sistem politik (Ufen, 2002, p 271 ff). Pihak itu emaskulasi dan pemilihan token diperkenalkan. Kontrol politik pun dilengkapi dengan 'penyederhanaan' sistem partai pada tahun 1973, yaitu Fusi paksa menjadi tiga partai. Undang-undang ini berdasarkan asumsi bahwa pemilih Indonesia membentuk massa mengambang. Partai politik, dengan Golongan Karya (Golkar, Kelompok Fungsional) sebagai satu-satunya pengecualian, tidak diizinkan untuk bekerja di tingkat administrasi yang lebih rendah agar dapat hindari politisasi sebuah populasi yang dikonsepsikan sebagai 'apung massa'. Golkar, kendaraan rezim, selalu bisa mempertahankan dua anak mayoritas di parlemen nasional, sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP, Partai Persatuan Pembangunan) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI, Partai Demokrasi Indonesia) menggenapifungsi dari partai oposisi yang dibatasi. Sebagian besar penduduk dikecualikan dari politik. Konflik ditanggung oleh mana-mana wacana integralisme dan harmoni sosial. Sementara jaringan organisasi partai politik hancur dan, dengan demikian, aliran lama melemah, itu tidak berarti bahwa ini 'Sungai' benar-benar lenyap. Organisasi massa Muslim yang besar, NU dan Muhammadiyah, tetap eksis, dan mereka mampu

mempertahkannya otonomi relatif, seperti halnya organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMII dan PMKRI. Bahkan dalam pembangunan sistem partai baru, rezim elit harus membuat konsesi. PPP sampai pada perwakilan tingkat tertentu dari komunitas Muslim dan PDI berfungsi sebagai penerus dari PNI dan beberapa partai Kristen yang lebih kecil. Karena kontinuitas ini, itu selalu mungkin untuk menganalisis hasil pemilihan dengan referensi untuk aliran (lihat, misalnya: Mackie, 1974; Liddle, 1978; Gaffar, 1992). Dengan latar belakang hubungan kekuatan politik yang relatif stabil, Indonesia mengalami perubahan ekonomi dan sosio-struktural yang mendalam. Paling tidak sampai awal tahun 1980an, ledakan itu terutama didorong dengan penjualan minyak bumi dan gas alam. Dengan harga yang menurun di pasar dunia, pemerintah terpaksa mengganti kebijakan secara bertahap menuju industrialisasi berorientasi ekspor. Pembangunan mencakup perluasan kelas menengah kecil sampai sekarang munculnya lapisan industri pekerja yang substansial. Diperdebatkan, urbanisasi dan individualisasi ini dan meningkatnya sosial dan geografis Mobilitas telah melemahkan ikatan sosial tradisional dan milieu. Meningkatnya tingkat pendidikan dan meningkatnya ketersediaan politik Informasi telah melahirkan seorang pemilih yang telah semakin meningkat lebih independen dari nasehat para pemimpin tradisional. Transformasi ekonomi Orde Baru ditemani.

Berawal dua sumber utama pemikiran politik di Indonesia inilah kemudian muncul lima aliran politik yaitu (Feith, 1966):

- 1) Komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat, walaupun mereka seringkali menggunakan istilah politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan abangan tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalam Partai Komunis Indonesia.
- 2) Sosialisme Demokrat yang juga mengambil inspirasi dari pemikiran barat. Aliran ini muncul dalam Partai Sosialis Indonesia.
- 3) Islam, yang terbagi menjadi dua varian; kelompok Islam Reformis (dalam bahasa Feith) atau Modernis dalam istilah yang digunakan secara umum yang berpusat pada Partai Masjumi; serta kelompok Islam konservatif atau sering disebut tradisional yang berpusat pada Nahdhadul Ulama.
- 4) Nasionalisme Radikal, aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia (PNI).
- 5) Tradisionalisme Jawa, penganut tradisi-tradisi Jawa. Pemunculan aliran ini agak kontroversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang kongkret, melainkan sangat memengaruhicara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya (PIR), kelompok-kelompok Teosufis (kebatinan) dan sangat berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan (pamong Praja).

1.5.2.4 Budaya Politik

Beberapa definisi mengenai budaya politik antara lain sebagai berikut

- a. “Sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu (G. A. Almond dan S. Verba).
- b. “Sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya” (Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews).
- c. “Suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai- nilai dan ketrampilan yang berlaku bagi seluruh anggotamasyarakat, termasuk pola-pola dan kecenderungan khusus serta pola-pola atau kebiasaan yang terdapat kelompok – kelompok masyarakat” (Almond dan Powell).

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik, terdapat tiga komponen yaitu: Komponen Kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang santri terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya (Almond dan Powel, 25).

Komponen Afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya

menerima atau menolak sistem politik itu. Komponen Evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Eagly dan Chaiken mengemukakan bahwa sikap seorang santri dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek politik, yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku. Sebagai hasil evaluasi, sikap yang disimpulkan dari berbagai pengamatan terhadap objek diekspresikan dalam bentuk respon kognitif, afektif (emosi), maupun perilaku. Gabriel A. Almond mengajukan pengklasifikasian budaya politik sebagai berikut:

1. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
2. Budaya politik kaula atau subyek, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif.
3. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Semua tipe kebudayaan politik merupakan skala suatu titik awal karena kesenjangan dapat terjadi dalam bentuk penolakan terhadap seseorang pemegang jabatan dan peranan penting dalam suatu perubahan sistematis, yaitu peralihan dari suatu kebudayaan politik yang lebih

sederhana menuju pola yang lebih kompleks. Berbagai kebudayaan politik dapat saja tetap bersifat campuran untuk waktu yang lama. Apabila kebudayaan tetap bersifat campuran, maka akan terjadi ketegangan antara kultur dan struktur serta adanya kecenderungan sifat menuju instabilitas struktural. Ada beberapa tipologi kebudayaan politik yang bersifat murni, maka dapat dibedakan 3 bentuk kebudayaan politik:

1. Kebudayaan Subyek-Parokial

Kebudayaan subyek parokial adalah suatu tipe kebudayaan politik di mana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus (Almond dan Powell, 29). Jadi perubahan dari kebudayaan politik parokial menuju kebudayaan politik subyek dapat dimantapkan pada sejumlah poin tertentu dan menghasilkan perpaduan politik, psikologi dan kultural yang berbeda-beda. Teori Gabriel dan Verba juga menegaskan bahwa jenis perpaduan yang dihasilkan mengandung manfaat besar terhadap stabilitas dan penampilan sistem politik tersebut.

2. Kebudayaan Partisipan-Subyek

Kebudayaan partisipan-subyek ini mempunyai proses peralihan dari kebudayaan parokial menuju kebudayaan subyek yang dilakukan pasti mempengaruhi cara bagaimana proses peralihan dari budaya subyek

menuju budaya partisipan berlangsung. Seperti ditunjukkan oleh Gabriel dan Verba bahwa penanaman rasa loyalitas nasional dan identifikasi, serta kecenderungan untuk mentaati peraturan pemerintahan pusat, merupakan masalah prioritas yang pertama bagi bangsa-bangsa yang baru muncul (Almond dan Powell, 30). Dalam budaya subyek-partisipan yang bersifat campuran itu sebagian besar masyarakat telah memperoleh orientasi-orientasi input-output yang bersifat khusus. Sebagian besar diorientasikan kearah suatu struktur pemerintahan otoritaritas dan secara relatif memiliki rangkain orientasi yang pasif.

3. Kebudayaan Parokial-Partisipan

Dalam kebudayaan ini kita mendapatkan masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di sejumlah Negara yang sedang berkembang. Di negara ini budaya politik yang dominan adalah budaya parokial. Norma-norma struktural yang telah diperkenalkan biasanya bersifat partisipan, demi keselarasan mereka menuntut suatu kultur partisipan. Sehingga persoalan yang perlu ditanggulangi ialah mengembangkan orientasi input dan output secara simultan. Bukan suatu hal yang aneh jika hampir semua sistem politik ini terancam oleh fragmentasi parokial, karean tidak ada struktur untuk bersandar bagi masyarakat, birokrasi tidak berdiri tegak terhadap kesetiaan

masyarakatnya, sedangkan infrastruktur tidak berakar dari warganegara yang kompeten dan bertanggungjawab (Almond dan Powell, 32). Perkembangan dari budaya parokial kearah budaya partisipandi lihat dari satu segi, nampaknya menjadi suatu hal yang tidak mempunyai harapan, tetapi jika kita ingat dengan kekuasaan dari loyalitas parokial yang hidup maju di Indonesia ini maka paling tidak boleh berkata bahwa perkembangan kearah budaya partisipan di negara berkembang belum di buka. Dengan begitu perlu melakukan penetrasi terhadap sistem-sistem parokial tanpa harus merusak sisi outputnya sekaligus menyalurkan dalam kelompok kepentingan yang terletak disisi input.

1.5.2.5 Identitas, Struktur, dan Keruangan Kota

Orang berdiam, tapi tidak dengan cara yang mereka pilih. Frase ini dari Marx pengamatan yang terkenal menangkap dengan baik tiga tema utama yang mendasari buku ini. Yang pertama menyangkut pertanyaan subjektivitas, berbeda, namun terkait, identitas, dan agensi; yang kedua, konsep ruang dan perannya masuk pola kehidupan sehari-hari; dan yang ketiga muncul dari pengakuan bahwa ada kendala sistematis dalam tindakan bahwa kita tidak bebasuntuk membuat diri kita atau bertindak di dunia seperti yang kita inginkan. Perdebatan atas interpretasi ketiga dimensi ini- identitas, ruang, dan struktur- jauh dari beres. Konseptualisasi dan hubungan mereka dengan masing-masing dengan yang lainnya adalah subjek

kontroversi dan diskusi yang meluas di zaman kontemporer teori sosial mereka memainkan peran penting karena mereka berhubungan ke tema dan kontroversi paling penting yang dihadapi masyarakat kita.

1.5.2.5.1 Masalah Identitas

Wacana pada akhir abad ke-20, dimana kota-kota di Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat, telah menjadi tempat dimana banyak sekali orang asing berkumpul, namun berada di bawah keadaan sosial politiknya yang sangat berbeda dari karakteristik gelombang imigrasi, pada akhir abad 19 keadaan-keadaan termasuk migrasi global ke kota - kota di Indonesia dari Negara-negara Barat, menciptakan pola budaya baru, etnis, bahasa, dan heterogenitas religius yang sekarang menantang kekuatan integratif negara-bangsa untuk berasimilasi dalam batas-batas ketetapan nasional, kemudian meningkatnya kehadiran diasporik dan identitas transnasional membentuk struktur baru di sekitar ruang yang sesungguhnya tidak bersedekatan. Mereka juga termasuk di dalam mengglobalnya kapitalis pasar, menciptakan arus modal dan tenaga kerja baru sambil melemahkan kemampuan bangsa-negara untuk mengatur negara-bangsa mereka dengan baik, bersamaan dengan terus berlanjutnya dinamika politik identitas, yang atas nama kekhasan bersaing dengan basis kesamaan politik kelas nasional atau sosialisme organisasi sebagai basis perlawanan terhadap kecenderungan homogenisasi pasar global atau pendefinisian peran birokrasi, dan persistensi segregasi rasial etnik dan ghettoisasi ruang sosial daerah

perkotaan di negara-negara Barat, juga telah merusak gagasan tentang identitas nasional kesatuan warga negara lain yang setara. Intensifikasi heterogenitas, perbedaan-etnis, ras, linguistik, dan religius - telah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dalam konteks postkolonial, di mana Eropa sekarang diputuskan. Sebagai wacana terhadap industrialisme dan modernitas institusi abad kesembilan belas terutama gerakan dari organisasi sosial berbasis negara dan kelas, kehilangan kekuatan untuk menata atau mengorganisir organisasinya di atas kehidupan lingkungan penduduk kota dan daerah, pertanyaan mengenai integratif kekuatan institusi saat ini untuk menerima surplus yang jelas mempertajam perbedaan sehingga berpotensi semakin membentuk wacana publik dan debat. Antara fragmentasi dan pluralisasi terbesit kecemasan atas sosok yang universal dari totalitas yang mendorong pemikiran sosial kontemporer untuk terlibat kembalidengan pertanyaan identitas. Motif sentral dalam perdebatan kontemporer pastinya bersifat radikal guna mempertanyakan asumsi-asumsi filosofis dan foundationalis wacana sosiologis yang dimiliki oleh teori konvensional dan perspektif Marxis. Kritik ini sekarang tersebar luas dan terkenal, namun implikasi dan konsekuensin untuk teori maupun praktiknya masih diperdebatkan. Meski demikian, telah melahirkan beberapa tema menonjol seperti perkembangan pengertian yang lebih besar bahwa identitas-siapa kita baik secara pribadi maupun secara kolektif itu tidak hanya ditemukan tetapi juga harus dilihat sebagai cara menciptakan refleksi

diri. Dalam Pandangan ini, identitas tidak ekspresif terhadap inti "esensialis" yang dalam, tapi lebih memandang identitas sebagai kontingen yang diartikulasikan melalui saling ketergantungan kemudian mempraktekannya berdasarkan niat dasar maupun tak sadat yang telah ditentukan sebelumnya. Memang, banyak dari motif ini sekarang sudah masuk dengan tegas ke dalam kesadaran zaman sosial-teoritis. Flux, fluiditas, multiplisitas, tumpang tindih, alteritas, dan hibriditas, ketidak penuhi, kealamian, dan esensi ahistoris, adalah istilah yang dikenal di banyak masyarakat dengan perspektif postmodern. Apakah ini mewakili sebuah (obyektif) ilusi bergejala dari periode masyarakat kapitalis yang didominasi oleh tontonan komoditas atau apakah itu mencerminkan pembukaan modernitas "orang lain"-yaitu keragaman yang ditekan oleh kecenderungan homogenisasi dari proyek modernis – sehingga menjadikan hal tersebut sebagai pusat tema dalam debat saat ini.

Melemahnya negara-bangsa dalam menghadapi tantangan baik dari luar (ekonomi global) maupun dari dalam perbatasan mereka (politik identitas), telah mempertanyakan kembali status demokrasi. Namun, itu belum menghilangkan keinginan moral yang terdapat pada semua pihak di berbagai wilayah dan pemerintahan untuk memasuki dunia publik dengan harapan dapat menyatukan nilai dan kepercayaan, meskipun hanya sementara. Persyaratan demokratis menetapkan pengalaman heterogenitas saat ini berdasarkan periode sejarah sebelumnya, walaupun terdapat

perbedaan yang terjadi, masalah yang menempa ruang publik masih memiliki nasib yang sama bahkan justru memasuki percakapan timbal balik mengenai ketidakhadiran takdir kelompok yang terlibat. Perintah secara normatif ini terus berlanjut mempengaruhi dan menyusun masalah demokrasi multikultural saat ini. Misalnya, gagasan gagasan tunggal universalis tentang kebaikan atau perbedaan politik yang terfragmentasi sebagai respon yang memadai terhadap masalah pengambilan keputusan kolektif dan pemecahan masalah di konteks pengakuan terhadap ketidakmampuan beberapa identitas. Karena pemerintah nasional meminimalkan fungsi regulatif dan kesejahteraan mereka, dilema ini menjadi semakin menjadi isu di subnasional tingkat wilayah dan kota. Salah satu tanggapan terhadap dilema ini adalah dengan adanya adopsi terhadap perspektif itu guna mengambil kompleksitas sebagai ciri khas identitas sosial. Pendekatan ini biasanya dimulai dengan mendekonstruksi apa yang disebut dengan pengandaian ensensialis yang tertanam dalam budaya dan rencana politik sehingga dapat mengekspos lebih jelas sifat identitas yang retak dan terlalu kaku, dengan demikian membentuk banyak permukaan kemunculan wacana seputar identitas. Arti rumah, persimpangan, perbatasan, perjalanan si migran, telah ditambahkan ke masalah keamanan, pembebasan, dan keaslian sebagai leitmotif dari masalah identitas hari ini.

Sebelumnya untuk memahami alasan dibalik kemunculan teori kota Marxian, penting untuk mengingat perspektif dominan tentang konflik dan kekuasaan dalam kehidupan politik perkotaan di tahun 1950an dan 1960an di Eropa Barat dan Amerika Utara, yang sebagian besar diartikulasikan dari konvensional ilmu politik dan sosiologi perkotaan. Robert Dahl's *Siapa Pemerintahan itu?* diterbitkan pada tahun 1961, yang memberikan argumen yang kuat tentang sifat pluralis dari sistem politik lokal (sistem politik nasional dan implikasinya), kemudian dengan cepat menjadi paradigma analitis yang dominan, baik di Amerika Serikat maupun di negara lain seperti Inggris. Bagi kaum pluralis, tidak adanya konflik luas pada periode pascaperang menunjukkan bahwa sistem politiknya kompetitif dan terbuka untuk kelompok kepentingan baru, yaitu pembagian kekuasaan yang tidak bersifat kumulatif, dan ada yang meluas (meski belum tentu bulat) atas tujuan dan nilai kebijakan publik di sosiologi pemerintah daerah perkotaan yang akan maju meskipun sebagian besar tidak bertentangan pandangan kehidupan kota berdasarkan paradigma ekologis yang pada gilirannya di Indonesia didasarkan pada model biologis dan mekanistik yang berasal dari ilmu alam dan fisika. Dalam perspektif ini, pola dan transformasi ruang urban (mengubah konfigurasi etnik dan kelas segregasi, distribusi spasial fungsi ekonomi dan politik), dijelaskan dalam hal paradigma evolusioner adaptasi fungsional dipengaruhi oleh variabel demografi dan pasar "alami", tercermin dari keseimbangan kekuatan sosial, demografis, dan ekonomi.

Ledakan protes sosial membahas seputar berbagai isu, mulai dari yang gerakan sosial baru ke "kerusuhan ghetto" di kota-kota dunia Barat pada tahun 1960an, jelas sekali bahwa kerangka kerja ini tidak memadai. Seperti yang telah dijelaskan oleh Claus Offe, bahwa memandang semua gerakan terjadi di luar jalur politik formal sebagai tuntutan yang irasional dan ekspresif, kemudian penyimpangan anomali juga bertentangan dengan karakteristik dari gerakan-gerakan ini. Sebagai contoh, nilai dan tujuan modernis keadilan rasial, kesetaraan, martabat, penghormatan terhadap lingkungan, lokal yang lebih besar otonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan daerah didukung oleh sebagian besar aktor kelas pekerja dan kelas menengah yang tidak mendukung teori perilaku kolektif irasional atau kehidupan kota merupakan sebuah konsensual dan nonkonflik. Terutama berkaitan dengan konflik perkotaan dan gerakan perkotaan, bahkan penjelasan yang dominan sama sekali tidak mengharapkan munculnya konflik.

Dalam karya terbarunya dan mungkin yang paling ambisius sampai saat ini, *The Rise dari Network Society dan The Power of Identity*, Castells mengemukakan Visinya tentang kontur dan kontradiksi utama munculnya masyarakat global abad kedua puluh satu. Komunitas "jaringan" baru ini berbeda dengan beberapa cara penting dari bentuk industri sebelumnya telah mencirikan kapitalisme selama beberapa abad terakhir. Dalam jaringan

masyarakat, fungsi ekonomi diaplikasikan di seputar bursa informasi dan beroperasi pada skala kecil, tidak didasarkan pada nasionalisme yang berpusat pada produksi industri. Organisasi berbentuk aliansi-rintang jaringan, dan keterkaitan antar aliansi, bukan secara vertikal birokrasi hierarki yang terintegrasi, pekerjaan tidak stabil, fleksibel, dan individual. Budaya bersifat *hyperreal* atau virtual (yaitu, media-jenuh). Negara-bangsa melemah dan menurun. Akhirnya, politik dan gerakan sosial cenderung diatur oleh pertahanan identitas dan spesifisitas dalam hal tempat dan sejarah.

Kontradiksi sentral dari jaringan masyarakat baru ini terletak pada konflik antara dinamika yang berlawanan dari apa yang disebut Castells "*the Net*" dan "*Self*." Dominasi Net muncul dari kemunculan struktur *selforganizing* seperti pasar dan pelaku ekonomi serta organisasi, yang secara instrumental dan abstrak bertujuan untuk manajemen arus informasi dan modal yang semakin kompleks di tingkat daerah. Namun, jaringan ini mendominasi juga mengancam reproduksi identitas kelompok sosial dan individu. Sedangkan identitas dibangun atas dasar makna budaya, yang spesifik dari segi tempat dan sejarah, reproduksi dari pasar, lingkaran informasi, dan sistem birokrasi beroperasi di mode kuasi otonom, seperti sistem umpan balik *cybernetic*, di atas pimpinan dan belakang para aktor sosial. Salah satu hasil bentrokan logika antitesis ini adalah munculnya

gerakan sosial yang ada pada karakteristik dalam periode pascaindustrial ini, seperti fundamentalisme agama, gerakan teritorial perkotaan, dan environmentalisme.

Meskipun ada perbedaan yang cukup signifikan berkaitan dengan apakah mereka defensif, melegitimasi status quo, atau berusaha mengubah hubungan kekuasaan yang ada. Bentuk lembaga baru ini menjadi diri mereka sendiri, memiliki karakteristik sebuah "jaringan, bentuk organisasi dan intervensi yang terdepresentasi". Misalnya gerakan lingkungan dan feminis di banyak negara yang diselenggarakan di sekitar koalisi lokal, nasional, dan internasional serta jaringan terdesentralisasi. Bentuk ini mencerminkan dan melawan logika dominan dari informasi masyarakat. Jaringan "*multiform*" atau badan sosial ini berbeda dengan "*batalyon tertib*" mantan agen perubahan sosial - seperti gerakan buruh - sehingga membuat eksistensi mereka lebih halus dan terdesentralisasi. *Castells* mengikuti *Alain Touraine* dan lainnya dalam mengamati terobosan yang sangat kontradiksi terhadap kapitalisme industri sentral yang berada dalam perjuangan antara kelas atas produk ekonomi. Memang, dia menyimpulkan Gerakan buruh saat ini tidak mencerminkan kontradiksi sosial dasar dan juga tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan.

Seperti semua tulisan *Castells* sebelumnya, teori baru tentang jaringan informasi masyarakat bersifat provokatif dan orisinal serta menyentuh

beberapa aspek paling mendesak dari sistem sosial kontempore, walaupun menunjuk pada dua area yang tetap tidak diuraikan secara baik. Yang pertama berhubungan dengan perbedaan teoritis antara *Net dan the self* atau Identitas. Tidak pernah dibuat jelas apa yang membedakan ini dua proses dan apa adanya tentang mereka yang kontradiktif atau bertentangan. Misalnya, tidak jelas mengapa harus ada perlawanan terhadap *Net*, untuk berkembangnya dominasi kehidupan sehari - hari oleh arus abstrak informasi, uang, dan kekuasaan. Jawaban atas pertanyaan ini saya tinggalkan sampai bab berikutnya di sana saya akan berpendapat bahwa teori sosial lebih memuaskan membangun wawasan Castells harus membangun seputar peran bahasa dalam proses sosial dan perbedaan teoretis antara sistem dan kehidupan dunia.

1.5.2.5.2 Ruang Hunian

Sebagai ruang hidup dalam kaitannya dengan lingkungan, pemandangan, dan komunitas seseorang dalam ruang tertentu. Seseorang tinggal di dalam subyektivitas milik orang lain yang di dalamnya milik bersama dengan saling berbatasan. Seseorang berdiam di dalam ruang antara diri sendiri dan citra yang lain. Untuk tinggal "berarti menghuni jejak yang ditinggalkan oleh orang lain dalam suatu memori waktu dan tempat. Meski menjadi sarana modern untuk mendamaikan diri dengan semacam tunawisma, meskipun demikian, untuk menjadi modern sepenuhnya berarti

membuat dirinya berada di rumah dengan pusaran dan kebingungan kehidupan modern. Saat saya menggunakannya, "urban" adalah nama lokus "pengalaman modernitas." Ini berartiruang sehari-hari kota, tempat perjumpaan dengan keragaman, orang asing, dunia perserikatan beberapa perserikatan, jaringan, dan jaringan yang saling tumpang tindih identitas. Ruang tempat tinggal mewakili dimensi kedua yang diteliti sini.

1.5.2.5.3 Permasalahan Struktur

Namun, bagaimanapun hal ini berpotensi lebih dapat mencair dan membuka pilihan identitas yang terlihat. pilihan ini tidak dapat terjadi dalam kekosongan kemungkinan tak terbatas. Marx berusaha menjelaskan struktur makro yang paling penting yang membentuk kemungkinan tindakan individu dan kolektif, dan banyak pengamat mengikutinya dalam mengidentifikasi ekonomi kapitalis sebagai pembentuk arti dan tindakan paling signifikan. Teori peran Marx dari ekonomi kapitalis dalam membentuk kesadaran, tindakan, dan kemungkinan perubahan sosial jauh lebih penting daripada pengakuan bahwa proletarianisasi adalah fenomena penting dalam kehidupan para pekerja Eropa abad kesembilan belas. Marx secara eksplisit berusaha menghubungkan dua dimensi masyarakat modern: krisis ekonomi dan tindakan kolektif berbasis kelas. Ekonomi kapitalis, mengambil kehidupan yang nampak mandiri, telah terlepas dari kendali langsung individu dan masyarakat. Gerakan dan keteraturannya tampaknya diikuti sebuah logika independen yang tak terlihat, diabstraksikan dari praktik

diskursif dari sehari-hari. Ini bekerja (dan masih bekerja) "di belakang punggung kami." Di Saat yang sama, dalam menghubungkan bangkitnya gerakan buruh dengan dengan krisis ekonomi, Marx secara implisit menangani masalah hubungan yang lebih umum antara apa yang hari ini kita sebut struktur dan agensi. Dia menunjukkan bagaimana logika dari struktur ekonomi yang diabstraksikan, melalui krisis dan kebutuhan memperluas akumulasi, mengganggu reproduksi substratum komunal dari kehidupan sehari-hari, mengantarkan perlawanan, protes, dan, berpotensi mentransformasi. Tentu saja, konseptualisasi ekonomi dan hubungannya dengan bentuk politik, budaya, dan ideologi telah diperdebatkan secara luas selama tiga puluh tahun terakhir. Hari ini, tidak ada pertanyaan untuk mempertahankan topologi reduktif di mana ekonomi yang menentukan, bahkan dalam hal cara yang rumit, suprastruktur bentuk kehidupan dan institusi sosial. Namun meskipun banyak kritik yang meyakinkan tentang determinisme ekonomi, kita tidak bisa melupakan pertanyaan yang coba dijawab oleh Marx. Tidak ada rintangan serius dan kemungkinan sosial progresif yang diperhitungkan. Perubahan dapat mengabaikan fakta bahwa ada struktur makro yang kuat. Aglomerasi baru dengan modal dan tenaga kerja yang besar, keuangan, dan sumber daya menciptakan kembali kota dan ruang di mana kita semua harus hidup. Transformasi dan intensifikasi kapitalis yang jauh dari ekonomi dalam skala global dan perubahan bentuk kekuasaan

negara sedang disusun kembalipola permukiman, arus kerja, dan hubungan antar kelompok ke dalam bentuk urbanisme baru dengan implikasi penting untuk penyesuaian kembali politik, agenda budaya-politik, bentuk ketidaksetaraan dan pengecualian baru, serta menciptakan peluang baru untuk perubahan. Ekonomi simbolis dari khayalan dan keinginan yang terkomodifikasi seperti *Disneyfication of New York Times Square* membawa banyak proyek ekonomi politik perkotaan pembangunan ekonomi. Saskia Sassen dan Susan Fainstein, misalnya, telah menunjukkan cara kekuatan ekonomi global telah berubah pusat-pusat kota besar dunia dan membatasi pilihan kebijakan lokal. Ini kekuatan tampaknya memiliki objektivitas kuasi-nyata yang sulit untuk daerah dan daerah untuk melarikan diri. Pada saat bersamaan, mereka menciptakan kondisi di mana lingkungan dan tempat tinggal berusaha melawan efek lokal dan kontradiksi yang dihasilkan oleh perubahan skala besar ini.

Meskipun demikian, tidak mungkin lagi membayangkan ekonomi sebagai struktur penentu dengan cara lama. Ketidaksepakatan muncul bagaimana menggambarkan isinya dengan cara yang sesuai dengan kritikekonomisme dan bagaimana mengkonseptualisasikan "objektivitas" struktur dengan cara yang konsisten dengan kritik terhadap esensialisme. Yang pertama tetap area kontroversi, terutama di Kiri. Sejarawan berpendapat bahwa transformasi sosial dari periode modern, seperti penciptaan negara-bangsa, urbanisasi, industrialisasi, dan perkembangan

ekonomi pasar diatur dan dibentuk melalui hukum dan institusi, paling baik dilihat dari segi logika ekonomi dan kekuasaan negara yang saling menguatkan. Sebaliknya daripada memandang negara sebagai cerminan kebutuhan fungsional ekonomi, mereka memandang baik birokratisasi dan komodifikasi sebagai penataan kekuatan. Modernitas dilihat melalui mata Marx dan Weber. Masalah kedua dan yang lebih kompleks adalah jalan yang nyatadari struktur objektivitas harus dikonseptualisasikan. Banyak kritikus poststrukturalisme atau perspektif postmodernis, termasuk kebanyakan penulis orang Marxis, melihat dekonstruksi menyeluruh tentang objektivitas atau "nyata" yang mengarah pada ditinggalkannya struktur untuk agensi, di identitas, kesadaran, dan agensi yang "bebas mengambang," "tidak dibatasi," dan seterusnya. Banyak teoretikus wacana memang memberi kesan obyektivistik bagaikan melempar bayi dalam air mandi yang memang patut disesalkan beberapa analisis poststrukturalis institusi sosial dan politik (berbeda dengan filsuf atau sastra kritikus) telah terlibat secara serius dengan perdebatan dalam teori sosial mengenai hubungan antara identitas dan struktur. Namun saya tidak berpikir bahwa tuduhan itu bahwa posisi postmodern tertentu menyiratkan kembalinya ke tempat idealis adalah benar. Kendati melakukan praktikisasi sifat struktur, khususnya dalam kaitannya dengan institusi politik dan ekonomi, yang terbaik adalah membacakebanyakan varian teori wacana sebagai upaya untuk memikirkan kembali gagasan tentang struktur dan untuk mendekonstruksi identitas /

struktur di dalam dengan cara yang kompatibel melalui kritik terhadap objektivisme. Meskipun demikian, ini adalah masalah teori sosial yang serius (masalah menghubungkan makro dan mikro, atau integrasi sosial / sistem) perlu diambil oleh seorang anti-esensialis teori sosial kritis.

Secara keseluruhan, tiga dimensi, identitas, ruang, dan struktur ini, mendefinisikan proyek teori urban kritis dan menimbulkan empat serangkaian pertanyaan yang terkait. Pertama, bagaimana kita bisa mengkonseptualisasikan aktor sosial dan menjelaskan variasi aksi sosial dan identitas kolektif melintasi waktu dan tempat? Kedua, apa saja pola spasial ekonomi, institusi politik dan budaya? Yang menjelaskan geografi dan morfologi masyarakat modern? Apa yang menyebabkan transformasi mereka? Apa arti ruang, dan bagaimana representasinya dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga, apa saja struktur makro utama itu? yang membatasi aksi sosial dan ruang identitas? Keempat, bagaimana Haruskah tiga dimensi saling terkait satu sama lain?

1.5.2.5.4 Identitas, Ruang, dan Keterbatasan Teori Urban

Mike Savage dan Alan Warde telah meringkas kontribusi utama sosiologi perkotaan dan cabang pemikiran yang terkait selama abad terakhir sebagai penjelasan dari hubungan saling ketergantungan institusi sosial sebagaibentuk pengalaman sehari-hari dalam pengaturan ruang kontekstual mereka. Marxis Teori urban muncul di akhir 1960-an sebagai yang paling

ambisius dan penting mencoba untuk menafsirkan kembali tradisi teori urban ini secara kritis, kerangka normatif (Maka tidak mengherankan, bahwa Walter pembacaan sosiospasi Benjamin baru-baru ini telah selesai dengan banyak hal oleh urbanis kritis. Pekerjaan Benjamin menyatu dengan pusat keprihatinan teori urban kritis untuk membuka topeng dan menguraikan kembalimakna dan pengalaman hidup sehari-hari-di jalanan, di arcade, dan di taman-dalam dinamika modernitas kapitalis. Untuk memahami alasan dibalik kemunculan kota dari teori Marxian, penting untuk mengingat perspektif dominan tentang konflik dan kekuasaan dalam kehidupan politik perkotaan di tahun 1950an dan 1960an di Eropa Barat dan Amerika Utara, yang sebagian besar diartikulasikan dari dalam konvensional ilmu politik dan sosiologi perkotaan. Robert Dahl's *Who Governance?* Yang diterbitkan pada tahun 1961, yang memberikan argumen yang kuat untuk sifat pluralis dari sistem politik lokal (dan, implikasinya, sistem politik nasional juga), dengan cepat menjadi paradigma analitis yang dominan, baik di Amerika Serikat maupun di negara lain seperti di Inggris.

Bagi kaum pluralis, tidak adanya konflik luas Pada periode pascaperang menunjukkan bahwa sistem politiknya kompetitif dan terbuka untuk kelompok kepentingan baru, yaitu pembagian kekuasaan tidak bersifat kumulatif, dan ada yang meluas (meski belum tentubulat) atas tujuan dan nilai kebijakan publik di pemerintah daerah. Selain itu, Sosiologi perkotaan juga maju sebagian besar tidak bertentangan dengan pandangan kehidupan

kota berdasarkan paradigma ekologis yang di Indonesia giliran didasarkan pada model biologis dan mekanistik yang berasal dari ilmu alam dan fisika. Dalam perspektif ini, pola dan transformasi ruang urban (mengubah konfigurasi etnik dan kelas segregasi, distribusi spasial fungsi ekonomi dan politik),

dijelaskan dalam hal paradigma evolusioner adaptasi fungsional dipengaruhi oleh variabel demografi dan pasar "alami", tercermin dari keseimbangan kekuatan sosial, demografis, dan ekonomi di luar angkasa.

Teori Marxis nampaknya menawarkan kerangka pemahaman yang lebih menjanjikan mengenai konflik perkotaan, dan kepentingan politik dan teoritis di dalamnya dihidupkan kembali di tahun 1960an. Ini berbeda dengan ortodoksi yang berlaku dengan melihat konflik, antagonisme, dan kontradiksi bukan sebagai perincian sistem tapi sebagai jantung masyarakat dan perubahan sosial. Meski Marxisme konflik yang diharapkan, lebih banyak masalah dengan mendamaikan dua hal yang khas ciri konflik perkotaan dengan teori antagonisme kelas. Pertama, arena di mana krisis perkotaan terwujud dan memobilisasi lingkungan sekitar terjadi biasanya di luar tempat kerja, di komunitas perumahan. Kedua, pelaku sosial terlibat dalam perjuangan kota tidak hanya di luar organisasi buruh seperti serikat buruh, tapi mereka tidak dapat digambarkan sebagai menempati posisi kelas pekerja yang unik, menjadi cross-class atau multiclass dalam komposisi. Kedua faktor ini merupakan tantangan bagi

penjelasan Marxis tentang krisis perkotaan, bidang penyelidikan yang sampai saat itu belum secara eksplisit ditangani dalam paradigma Marxian. Di seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara pada masa periode pascaperang, dinamika urbanisasi, investasi real estate, dan spekulasi di tanah kota menyebabkan perpindahan sebagian besar orang miskin dan orang-orang kelas pekerja. Ini juga membawa aliansi pemerintah daerah dan modal real estat, dan dalam beberapa kasus, buruh terorganisir lokal, menjadi oposisi yang meningkat dengan penduduk lokal yang dimobilisasi untuk melindungi rumah dan lingkungan mereka. Warga bergabung bersama untuk menolak pembangunan kembali, lebih sering daripada tidak sedikit keberhasilan. Meski peserta bisa diklasifikasikan sebagai "pekerja", mereka bertindak sebagai cross-class koalisi penduduk atau sebagai konsumen perumahan dan ruang. Karena konflik perkotaan ini melebihi item konsumsi seperti hak untuk perumahan dan over space, hak untuk menghuni tempat tinggal, hubungan mereka ke organisasi kelas seperti serikat pekerja (atau juga, seperti di Prancis, Partai Sosialis atau Komunis) tidak ada atau tidak terjadikan ketegangan. Semua ini ditambahkan ke aktor baru, kontradiksi sosial baru, dan tantangan baru untuk teori dan strategi progresif.

Pengamat kontemporer menegaskan rasa sosio ekonomi yang penting dan transformasi politik. Merefleksikan seorang siswa Paris sebagai pemberontakan, misalnya, Alain Touraine berbicara tentang "perjuangan

kelas baru di daerah baru kehidupan sosial seperti kehidupan kota, pengelolaan kebutuhan dan sumber daya, pendidikan, yang bagaimanapun bukan konflik ekonomi. Saat ini kelas pekerja bukan lagi protagonis dalam evolusi historis. "Daniel Singer menulis bahwa krisis Prancis (Mei 1968) "tidak mengkonfirmasi teori ekstrim tentang kelahiran kelas revolusioner baru yang berlangsung secara tradisional dikaitkan dengan industri pekerja, kaum proletar. Mereka menyarankan perpecahan baru, dan keselarasan baru mencerminkan kontradiksi sosial baru.

Sebagai "kota" mulai terbentuk sebagai obyek dan medan politik dan konflik ideologis, teoretikus Marxis dan politisi sosialis mengambil tantangan untuk menafsirkan realitas historis baru ini. Henri Lefebvre, salah satu filsuf besar Marxis di Prancis, Sudah berbicara pada tahun 1968 tentang "hak atas kota" dan menunjuk pada transformasi industri ke masyarakat perkotaan sebagai fitur yang paling signifikan pengalaman sosial kontemporer. Debitur Situasionalis dan Guy (anggota mereka yang paling terkenal) membuat ruang kota menjadi kanvas yang antipolitis baru bisa dibayangkan.

Namun, Tantangan bagi Kiri ditangkap paling sistematis oleh sosiolog Manuel Castells, yang dikaitkan pada saat itu dengan revisionis Marxisme Louis Althusser dan Nikos Poulantzas kaum urbanis Marxis yang pada akhir 1960-an dan 1970-an mulai bekerja tentang sebuah paradigma baru pada

pertemuan teori Marxian dan urban berusaha untuk memenuhi tantangan dengan menunjukkan hubungan antarasumber kontradiksi sosial perkotaan di kelas-sifat kontradiktif masyarakat kapitalis dan manifestasi kontradiksi ini di Indonesia sebagai konflik perkotaan dan antagonisme. Ini perlu karena urbanisasi baru nampaknya telah memutuskan hubungan antara struktur kapitalis dan agen kelas pekerja yang paling menonjol di industri kota. Pada tingkat yang paling umum, tugasnya adalah, pertama, untuk menunjukkan bagaimana dinamika Perkembangan ekonomi kapitalis menciptakan institusi tata kota dan pola kehidupan sehari-hari, seperti perpisahan antara tempat kerja dan ruang hunian masyarakat, dan kedua, untuk kemudian menunjukkan bagaimana struktur urban ini membentuk pola baru pembentukan identitas kelompok dan konflik antar pelaku perkotaan. Karena gerakan sosial perkotaan biasanya mencakup masalah konsumsi (mis., perumahan yang terjangkau, transportasi), otonomi politik dan masyarakat kontrol, dan masalah kualitas hidup lainnya, dan bukan masalah yang melibatkan produksi hubungan, argumen ini perlu untuk menutup kesenjangan antarasumber kelas kontradiksi sosial dan efek *nonclass* dari krisis perkotaan.

Pada saat bersamaan, semua teoretikus beralih ke masalah ini, di berbagai tingkat untuk memastikan, kebutuhan akan solusi yang tidak sederhana mengurangi sensitifitas masalah kelas di perkotaan terhadap

masalah totalitas dan reduksionisme oleh Althusser, kaum urbanis Marxis memeluk kebutuhan tersebut dan mengembangkan konseptualisasi perkotaan sebagai struktur kelas otonom yang relative. Isu yang menentukan untuk urbanisme Marxis demikian dapat diringkas sebagai masalah bagaimana mengintegrasikan bidang urbanisme (tata ruang kehidupan sehari-hari) ke dalam skema kelas Marxis. Pada risiko penyederhanaan, kita bisa mengatakan bahwa apa yang dihubungkan semua teoretikus Marxis dari kota adalah kebutuhan untuk menentukan hubungan nonreduktif antara struktur dan praktik yang berlangsung di tempat kerja dan masyarakat tempat tinggal. Kenapa ini? Ini muncul langsung dari keprihatinan ganda teori Marxis dan urbanisme: kelas dan ruang. Seperti yang akan ditunjukkan dalam Bab 1, ada asumsi spasial implisit yang dibangun ke dalam Marxiangagasan kelas, terlepas dari kenyataan bahwa hal itu telah terbengkalai dalam perdebatan di kelas. Konsep kelas Marxis secara implisit mengatur pengertian abstrak kelas dan ruang kelembagaan dan diskursif tempat kerja seperti yang dikembangkan di masyarakat industri Barat. Ini bukan kontingen ciri teori Marxis, seperti yang ditunjukkan oleh Erik Olin Wright.

Pemisahan fisik dan diskursif tempat kerja dan perumahan Komunitas adalah celah tersembunyi atau retakan, "jarak" di Marxisan konsep kelas. Modalitas celah ini (atau "kekurangan") membentuk subjek dari bab berikut. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa semua tiga teoretikus yang diteliti di

bawah ini, teoretikus terkemuka Marxian urbanisme, mengambil pemisahan ini antara pekerjaan dan rumah lebih atau kurang secara eksplisit sebagai masalah utama yang harus dipecahkan. Misalnya David Harvey telah menggambarkan tujuan teori urban Marxian sebagai kebutuhan "untuk menerangi pertanyaan menjengkelkan yang mengelilingi hubungan antara konflik masyarakat dan pengorganisasian masyarakat di satu sisi, dan konflik industri dan pengorganisasian berbasis kerja di sisi lain. Argumen "Ira Katznelson's di City Trenches berlangsung dari pengamatan itu "Politik urban Amerika telah diatur oleh batasan dan peraturan yang menekankan etnisitas, ras dan teritorialitas, bukan kelas dan itu menekankan distribusi barang dan jasa, sambil mengecualikan pertanyaan hubungan produksi atau tempat kerja. Inti dari peraturan ini telah menjadi pemisahan radikal dalam kesadaran, ucapan, dan aktivitas politik kerja dari politik masyarakat. "Dan Manuel Castells telah mengamati bahwa "sementara yang terdepan dalam proses industrialisasi ditempati oleh perjuangan antara modal dan tenaga kerja untuk berbagi produk dan membentuk negara, halaman belakang tumbuh kota-kota merupakan tempat yang bandel, sering diabaikan perlawanan warga untuk menjaga otonomi di rumah dan makna mereka di komunitas mereka. "Castells menyimpulkan bahwa "baik asimilasi konflik perkotaan ke kelas perjuangan maupun seluruh kemerdekaan keduanya merupakan proses sosial perubahan bisa dipertahankan. Hanya dengan memusatkan perhatian pada interaksi antara dinamika sosial perjuangan

kelas dan dinamika perkotaan yang isinya harus didefinisikan ulang dalam setiap situasi historis, apakah kita bisa mengerti perubahan sosial dengan cara yang bisa dipahami. Antara akhir 1960-an dan akhir 1980-an, muncul di beberapa disiplin ilmu dan dalam beberapa konteks nasional, pendekatan Marxis di perkotaan teori telah membuat kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang proses perkotaan. Beberapa pertanyaan tentang kota yang ingin kami tanyakan tampaknya sulit untuk menjawab tanpa setidaknya beberapa pendekatan Marxis. Pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut perkembangan seperti pola historis urbanisasi dan pertumbuhan kota yang berkorelasi baik dengan skala besar perubahan seperti feodalisme hingga kapitalisme (setidaknya di Eropa Barat dan Amerika Utara), peningkatan luas dalam urbanisasi global sejak awal abad kesembilan belas, transformasi penggunaan lahan dan geografi sosial selama periode industrialisasi, dan siklus pembusukan perkotaan dan pembaruan. Mempekerjakan konsep reproduksi tenaga kerja, pendekatan Marxian telah membuka hubungan struktural antara produksi ruang tempat kerja dan ruang konsumsi masyarakat dan keluarga dan rumah. Perbedaan klasik antara nilai pakai dan nilai tukar telah diterapkan pada masyarakat setempat, lingkungan sekitar, dan perjuangan perumahan untuk menyoroti kontradiksi yang membuat orang miskin setempat, minoritas, dan warga kelas pekerja terhadap pengembang properti dan spekulasi tanah dalam analisis Marxis telah menunjukkan betapa eratnyanya, komunitas yang dibatasi, di tempat kerja dan

di komunitas perumahan, dapat menciptakan solidaritas yang dibutuhkan untuk tindakan kolektif berbasis kelas. Analisis Marxian telah mengklarifikasi fungsi kontradiktif lokalnegara dalam mendamaikan konsumsi dan masalah kualitas hidup dengan kebutuhan untuk mendorong akumulasi. Fokus pada dimensi spasial peredaran modal telah membantu teori urban menjauh dari evolusi model perubahan urban menjadi satu yang mengakui peran krisis dalam irama akumulasi modal. Hal ini telah memberi kontribusi pada penjelasan fenomena seperti gentrifikasi dan pengabaian dalam istilah perkembangan gabungan dan tidak merata, yaitu, sebagai fenomena yang saling terkait. Selain itu, memahami distribusi spasial ekonomi sumber daya dan investasi menerangi geografi ketidaksetaraan dan keadilan sebagai salah satu aspek dari dinamika yang kontradiktif dan kritis terhadap krisis ekonomi kapitalis.

Terlepas dari kekuatan ini, kini paradigma Marxis telah kehilangan banyak dari kekuatannya. Padahal pada awal berdirinya ia mengatur parameter untuk kritis analisis urban, pada tahun 1990an, fotonya telah berubah secara dramatis bahwa beberapa kritikus bisa mengklaim bahwa tradisi Marxian telah tercapai sebuah jalan buntu. Walau bisa diduga bermanfaat dalam menerangi dinamika ekonomi itu mempengaruhi pola spasial kehidupan sosial, cabang Marxian teori urban telah mengalami

kesulitan untuk menangkap sifat yang telah ditentukan sebelumnya agensi dan identitas, mengembangkan konsep nonreduktif tentang kekuasaan negara dan representasi budaya, dan melanggar dengan gagasan objektivistik minat dan agensi sosial. Tentu saja, masalah ini tidak unik dalam Urbanisme Marxis, tumpang tindih dalam jumlah besar dengan meluas perdebatan di kiri dan di antara teori sosial terakhir tiga dekade. Padahal, selain masalah pemutusan dengan objektivistik Gagasan tentang ruang geografis, mereka tetap menjadi pertanyaan utama yang belum terselesaikan menghadapi teori urban Marxian.

Masalah pertama muncul dengan sendirinya dalam hal menghubungkan tempat kerja dan identitas berbasis masyarakat, misalnya, dalam serikat pekerja dan organisasi lingkungan seperti organisasi penyewa atau gerakan untuk otonomi lingkungan yang lebih besar dari pemerintah pusat dan / atau daerah. Perdebatan tentang sifat identitas urban yang dimiliki oleh kelas telah ada berputar seputar pertanyaan tentang otonomi atau keunggulan. Identitas urban dipandang sebagai manifestasi identitas kelas yang terlantar atau, di mana Alternatif telah muncul, sebagai dasar tindakan yang berbeda secara analitis kelas, meskipun yang terakhir benar-benar tidak lagi jatuh dalam posisi kerangka seorang Marxis. Tak satu pun dari solusi ini menghindari masalah esensialisme, dan sebuah pendekatan yang bisa menangkap jalan di mana

identitas tumpang tindih dan terlalu banyak diperlukan untuk memahami cara kelompok identitas saling terkait dalam mosaik kota. Kritik terhadap pandangan reduksionis negara dan pemerintah sebagai turunan dari kebutuhan hubungan ekonomi kapitalis sudah baik diketahui dan tidak perlu dilatih disini. Seperti yang dimiliki berbagai penulis menunjukkan, menurunkan kebijakan negara dan pemerintah dari fungsional kebutuhan akumulasi kapitalis tidak adil terhadap interaksi ekonomi, negara, dan proses urbanisasi. apa yang yang penting dalam konteks sekarang adalah menyadari bahwa sebagian besar, teori urban Marxis telah menganut konsepsi reduksionis ini tentang teori negara, dan dengan itu anggapan bahwa struktur utama makroelementasi dalam kehidupan sosial tetaplah ekonomi kapitalis. Meski determinasi ekonomi bisa ditolak, sebagai titik tolak ukur, masalahnya teori otonomi negara relatif tetap

Sejauh menyangkut penanganan ruang, urbanisme Marxian cenderung beroperasi dengan konsep ruang terbatas yang mirip dengan tradisi komunitas-studi. Namun, gagasan tentang ruang mutlak, itu adalah, sebagai wadah hubungan sosial - saat bekerja dengan baik untuk beberapa daerah yang mirip dengan yang kecil, terbatas, artisanal dan proletar komunitas kota industri abad kesembilan belas - dengan sendirinya tidak memadai untuk menangkap dinamika identifikasi dan jejaring sosial di

Indonesia kondisi kontemporer. Teori urban Marxian mewarisi, namun secara ambivalen, teori jawaban diberikan pada tiga pertanyaan identitas, ruang, dan struktur oleh skema Marxis klasik: Bagaimana seharusnya kisaran identitas kolektif dipahami? Apa peran ruang dalam hubungan sosial? Apa apakah kendala utama dan penataan kondisi dalam kehidupan sosial? Katznelson telah menunjukkan bagaimana, dengan membangun karya awal Engels di Manchester, tradisi urbanisme Marxian telah menjawab tiga pertanyaan di dalamnya

Istilah menghubungkan variasi dalam formasi kelas pekerja, perubahannya di ruang fisik kota dan di lembaga sosial kehidupan sehari-hari (pola tempat kerja, rumah, ruang publik), dan transformasi dalam struktur kelas dan perkembangan kapitalis. Perkiraan Engels tentang bagaimana struktur kelas spasial kapitalisme industri dan kelas pekerja lingkungan mengizinkan pembagian cara hidup (apa yang akan kita lakukan hari ini memanggil jejaring sosial) memelopori teori sosial perkotaan kritis yang menunjukkan bagaimana ruang berdua menengahi struktur dan agensi dan konstruksi identitas kelas dengan mendistribusikan dan memisahkan subyek di seluruh pemandangan kota.

Bagian terpenting dari warisan ini tetap merupakan tiga pertanyaan Itu ada di balik jawaban khusus yang diberikan oleh teori urban Marxian. Jawabannya sendiri-keunggulan identitas kelas, fisikawan yang dibatasi konsepsi ruang, dan keutamaan ekonomi kapitalis sebagai struktur

modernitas - tidak lagi memadai. Apa ini menunjukkan, kemudian, adalah pergeseran dalam hal analisis dan transformasi yang bersamaan dari agenda teori urban kritis. Saya mengusulkan sebuah perspektif yang bisa memberikan tiga jawaban baru untuk tiga pertanyaan lama, jawaban yang bisa menangkap identitas yang lebih cair, banyak, terlalu ditentukan, daripada dikurangi ke kelas, memberikan konsepsi ruang yang bisa merangkul representasional dan imajiner, serta fisik dimensi perkotaan dengan batas ambivalen dan tak dapat diputuskan, dan mengidentifikasi efek represif dari "normalisasi," pengawasan, dan penuntasan hidup sehari-hari yang dihasilkan dari logika birokratisasi, yang sekarang bertindak bersama komodifikasi sebagai independen sumber dislokasi hubungan sosial yang menetap atau sedimen, identitas, dan tradisi budaya. Ketiga dimensi ini tidak hanya menyediakan arsitektur dan perhatian utama buku ini, mereka juga merupakan tema utama dalam teori urban kritis saat ini.

Tujuannya adalah integrasi fenomena hubungan spasial perkotaan di dalamnya teori kelas Marxis. Misalnya, ia berusaha menyediakan kerangka pemersatu yang bisa menangkap hubungan antara berbagai kelas, masyarakat, lingkungan, etnis, atau bentuk teritorial identitas dan kelompok milik yang menyusun kedua jalinan kehidupan sehari-hari dan pola-polanyainvestasi kapitalis dan tata kota di tanah, perumahan, dan ruang. Tesis inti urbanis Marxian dapat dinyatakan sebagai berikut: Karena kota

modern merupakan salah satu komponen struktur sosial kapitalis yang lebih besar, kontradiksi dan antagonisme yang muncul di dalam dan di seluruh perkotaan ruang-yang pada pandangan pertama diatur terutama di sekitar ekonomikelas atau hubungan produksi - paling baik dijelaskan dalam persyaratan kelas. Konflik atas perumahan yang terjangkau, nasib lingkungan yang menghadapi pembongkaran, distribusi sumber daya di antara wilayah kota yang bervariasi kelas, ras, atau etnisitas, dan tuntutan untuk partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan lokal mengekspresikan kontradiksi yang mengadu kepentingan spekulasi *real estate*, tuan tanah sewaan, dan negara bagian setempat dikomodifikasi dan valorisasi lahan, perumahan, dan ruang yang lebih besar terhadap nilai penggunaan yang terkandung di dalam rumah dan jaringan sosial residensial orang yang bekerja dengan menunjukkan bagaimana logika investasi dan peredaran modal membentuk institusi politik perkotaan dan tata ruang pengorganisasian kehidupan sehari-hari dalam hal reproduksi tenaga kerja kekuasaan, dan dengan menunjukkan bagaimana konflik, isu, dan aktor perkotaan pada gilirannya dibentuk oleh proses perkotaan ini, teori urban Marxian ditutupkesenjangan antara aktor dan isu nonclass yang nyata dan yang diklaim sumber konflik kelas.

Meski kota modern dipandang sebagai mosaik yang dibedakan dan lingkungan tumpang tindih masyarakat, tempat kerja, dan lingkungan sekitar yang diselenggarakan berdasarkan status, etnisitas, dan agama, teori urban

Marxian menolaknya posisi yang mengklaim bahwa tidak ada satu bidang pun yang memiliki keunggulan analitik dalam tekad dan penjelasan tentang perubahan sosial, posisi yang ditinggalkan gagasan tentang serangkaian hubungan sosial yang objektif yang membentuk bentuk solidaritas, kesadaran, dan identitas. Untuk melakukannya akan meninggalkan implikasi politico-teoritis dari materialisme historis di mana antagonisme yang mengekspresikan kontradiksi struktural terkait dengan sebuah proses dialektis emansipasi perubahan sosial. Urbanisme Marxisme dengan demikian mempertahankan gagasan bahwa struktur kelas, identitas, dan pembentukan minat adalah kategori utama untuk memahami perjuangan populer perkotaan dan bentuk kekuasaan. Dengan demikian, ini adalah perspektif yang paling relevan secara strategis ke politik emansipatoris untuk kota kontemporer.

Inilah urbanisme yang terkait dengan tradisi Marxian seperti yang diadopsi oleh banyak sektor lain di Kiri, dan itu adalah urbanisme Saya menantang dalam buku ini. Berfokus pada pertanyaan identitas kota aktor, saya akan menentang keunggulan kelas dan untuk batasan kelas-dan untuk batas teori urban Marxian. Ini penting untuk Namun, tekankan bahwa batasan yang ada dalam pikiran saya terutama teoritis, tidak empiris Tujuan saya bukan untuk memberikan bukti empiris prevalensi bentuk nonclass aksi kolektif perkotaan dalam situasi tertentu.

Bentuk tindakan seperti itu tidak akan mengejutkan, tapi itu juga tidak akan sangat mencerahkan, karena tidak akan terlibat secara memadai dengan asumsi Marxian bahwa bentuk identitas nonklas harus dipahami dalam keseluruhan elemen kelas terlantar atau tersamar. Sebaliknya, saya berpendapat bahwa pola hubungan sosial lintas perkotaan ruang menciptakan celah atau dislokasi - atau seperti yang akan saya sebut, meminjam istilah dari Jacques Derrida, "jarak" - dalam proses identifikasi yang membentuk dasar identitas kelompok dan individu. Karena Jarak ini merupakan konstitutif identitas dan bukan deformasi beberapa orang identitas penting sebelumnya (misalnya, perbedaan rasial bukanlah fragmentasi dari kesatuan kelas sebelumnya tapi bersifat konstitutif terhadap kelas), maka hal itu menghalangi penutupan identitas di sekitar batas atau ruang tunggal. Orang Marxis Gagasan tentang identitas kelas mengandaikan penutupan semacam itu sebagai potensi, jika bukan fakta terlengkap (yaitu, sebagai telos). Pengakuan konstitutif Sifat dislokasi ini meruntuhkan klaim untuk analisis status istimewa identitas kelas vis-à-vis yang lain di kota.

Hal ini harus tegas menekankan, berdebat melawan relevansi kelas, jika dengan ini kita mengerti sebuah kelompok yang sahamnya ekonomis minat. Mengingat meningkatnya ketidaksetaraan sumber daya dan institusi ekonomi, tindakan kolektif terorganisir dari subyek sebagai pekerja yang mengejar keadilan ekonomi adalah salah satu unsur politik progresif yang

tak terpisahkan jadwal acara. Apa yang saya bantah bertentangan adalah idenya, masih dipertahankan oleh beberapa bagian dari Kiri, bahwa politik kelas mewakili, atau dapat mewakili pokoknya, kategori pemersatu melawan partikularisme dan perpecahan orang lain identitas. Apa yang saya bantah adalah memikirkan ulang, tidak mengabaikan, kelas, memikirkan kembali konsep dalam terang perkembangan sosial dan teoritis beberapa dekade terakhir ini telah membawa masalah koalisi terdepan baik pertimbangan teoritis maupun strategis. Stanley Aronowitz telah meringkas keprihatinan banyak orang yang telah menyadarinya "Pertanyaan untuk sosialisme tradisional adalah apakah ia dapat berteorihubungannya dengan gerakan sosial baru "atau dikutuk kelompok yang mengorganisir di luar organisasi kelas pekerja tradisional.

Kelemahan asumsi ekonomi dan reduksionis Marxian teori, termasuk subdisiplin perkotaan, telah dikenal luas dan diperdebatkan. Kurang jelas adalah alat konseptual alternatif itu harus menggantinya. Karya ketiga penulis, Manuel Castells, David Harvey, dan Ira Katznelson, merupakan upaya terpenting untuk memenuhi keberatan yang dibahas atas. Mereka telah berusaha untuk mengatasi masalah kelas dan reduksionis di tempat kerja dengan mengusulkan model revisionis ruang dan kelas. Upaya ini belum berhasil, dan salah satu tujuan utama buku ini untuk menjelaskan mengapa begitu. Sebuah bangunan urbanisme kritis di

tradisi sosialis demokratis tidak bisa diselamatkan dari kesulitan yang ada dengan pemetaan Marxian tentang ruang kota dan ruang subjek. Pada saat yang sama, seperti akan menjadi jelas, membayangkan sebuah perspektif baru tidak bisa meninggalkan beberapa pertanyaan kunci yang diwarisi dari orang Marxian tradisi. Bab-bab berikut mengikuti kekurangan paling banyaktanggapan penting terhadap kritik reduksionisme kelas dan terus berlanjut mengusulkan cara alternatif untuk melihat identitas, struktur, dan ruang yang menghindarinya kekurangan ini .

Orang berdiam, tapi tidak dengan cara yang mereka pilih. Frase ini dari Marx pengamatan yang terkenal menangkap dengan baik tiga tema utama yang mendasari buku ini. Yang pertama menyangkut pertanyaan subjektivitas, berbeda, namun terkait, identitas, dan agensi; yang kedua, konsep ruang dan perannya masuk pola kehidupan sehari-hari; dan yang ketiga muncul dari pengakuan bahwa ada kendala sistematis dalam tindakan - bahwa kita tidak bebas untuk membuat diri kita atau bertindak di dunia seperti yang kita inginkan. Perdebatan atas interpretasi ketiga dimensi ini- identitas, ruang, dan struktur- jauh dari beres. Konseptualisasi dan hubungan mereka dengan masing-masing yang lainnya adalah subjek kontroversi dan diskusi yang meluas di zaman kontemporer teori sosial Mereka memainkan peran penting seperti itu karena mereka berhubungan ke tema dan kontroversi paling penting yang dihadapi masyarakat kita.

Pada akhir abad ke-20, kota-kota di Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat, telah menjadi tempat dimana banyak sekali orang asing berkumpul, namun berada di bawah sosial politik keadaan berbeda secara signifikan dari karakteristik gelombang imigrasi terakhir, pada akhir abad kesembilan belas keadaan ini termasuk migrasi global ke kota - kota di Indonesia, Negara-negara Barat, menciptakan pola baru budaya, etnis, bahasa, dan heterogenitas religius yang sekarang menantang kekuatan integratif negara-bangsa untuk berasimilasi, dalam batas-batas nasional tetap, meningkatnya kehadiran diasporik, identitas transnasional terstruktur di sekitar ruang yang tidak bersebelahan. Mereka juga termasuk globalisasi kapitalis pasar, menciptakan arus modal dan tenaga kerja baru sambil melemah kemampuan bangsa-negara untuk mengatur baik, bersamaan dengan terus berlanjut dinamika politik identitas, yang atas nama kekhasan bersaing dengan basis universalistik politik kelas nasional atau sosialis organisasi sebagai basis perlawanan terhadap kecenderungan homogenisasi pasar global atau peran birokrasi yang didefinisikan, dan persistensi segregasi rasial dan etnik dan ghettoisasi ruang sosial daerah perkotaan di negara-negara Barat, yang telah merusak gagasan tentang identitas nasional kesatuan warga negara yang setara.

Intensifikasi heterogenitas dan perbedaan-etnis, ras, linguistik, religius - telah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dalam postkolonial

konteks, di mana Eropa sekarang diputuskan. Sebagai wacana dan institusi industrialisme dan modernitas abad kesembilan belasterutama gerakan dan organisasi sosial berbasis negara dan kelas, kehilangan kekuatan penataan mereka di atas kehidupan penduduklingkungan, kota, dan daerah, pertanyaan mengenai integratif kekuatan institusi saat ini untuk menerima surplus yang jelas iniperbedaan semakin membentuk wacana publik dan debat. Antara fragmentasi dan pluralisasi terletak kecemasan atas sosok yang universal, dari totalitas, mendorong pemikiran sosial kontemporer untuk terlibat kembali dengan pertanyaan identitas.

Motif sentral dalam perdebatan kontemporer pastinya bersifat radikal mempertanyakan asumsi-asumsi filosofis dan foundationalis wacana sosiologis yang dimiliki oleh teori konvensional dan Marxis perspektif. Kritik ini sekarang tersebar luas dan terkenal, namun implikasinya dan konsekuensi untuk teori dan praktiknya masih diperdebatkan hangat dan belum berhasil. Meski demikian, beberapa tema menonjol. Telah berkembang pengertian yang lebih besar bahwa identitas-siapa kita secara pribadi, secara kolektif - paling baik dilihat sebagai proyek reflektif diri untuk menciptakan diri yang tidak ada yang bisa ditemukan atau ditemukan. Dalam pandangan ini, identitas tidak ekspresif terhadap inti "esensialis" yang dalam, tapi paling baik dipandang sebagai kontingen dan diartikulasikan melalui saling ketergantungan dan praktek yang telah

ditentukan sebelumnya disusun oleh niat sadar dan keinginan tak sadar. Memang, banyak dari motif ini sekarang sudah masuk dengan tegas ke dalam kesadaran sosial-teoritis zaman. Flux, fluiditas, multiplisitas, tumpang tindih, alteritas, dan hibriditas, bukan kepenuhan, kealamian, dan esensi ahistoris, adalah istilah yang dikenal di banyak masyarakatperspektif postmodern tentang identitas. Apakah ini mewakili sebuah (obyektif) ilusi bergejala dari periode masyarakat kapitalis yang didominasi oleh tontonan komoditas atau apakah itu mencerminkan pembukaan "orang lain" modernitas-yaitu keragaman yang ditekan oleh yang pastikecenderungan homogenisasi dari proyek modernis - juga merupakan pusattema dalam debat saat ini.

1.5.2.6 Perilaku Pemilih dan Perilaku Organisasi atau Partai Politik

1.5.2.6.1 Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka mempengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan bersangkutan (Firmansyah, 2007:102)

Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesuai Perang Dunia II. Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan iniialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi

mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya lebih manfaat untuk mempelajari perilaku (behavior) manusia karena merupakan gejala benar-benar bisa diamati (Miriam Budiardjo,2008:74)

Berdasarkan anggapan bahwa perilaku politik hanya salah satu dari keseluruhan perilaku, maka pendekatan ini cenderung untuk bersifat interdisipliner.Ia tidak saja mempelajari faktor pribadi, tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti budaya, sosiologis, psikologis (Miriam Budiardjo, 2008:74).

Perilaku pemilih ini perlu dikembangkan dalam rangka membuat strategi pemasaran politik yang tepat. Selain itu Perilaku Pemilih juga dapat ditunjukkan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Desa.

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi, begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten terhadap janji dan harapan yang mereka mereka berikan.

Perilaku pemilih dapat dianalisa melalui tiga pendekatan yaitu (Adman Nursal, 2004:54)

1. Pendekatan sosiologis

Menurut *Mazgab Columbia* yang dikutip oleh Adman Nursal pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

Secara sosiologis manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia hidup di lingkungan sosial yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang saling mempengaruhi. Manusia hidup dalam kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, jamaah, persekutuan doa, sekolah, kampus. Sehingga perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh anggota kelompok lainnya atau sesuai dengan anggota kelompoknya (Kusnaedi, 2009:188).

Menurut *Bone dan Ranney* (1998) dalam Adman Nursal ada 3 tipe utama dalam pengelompokan sosial.

a. Kelompok kategorial

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki satu atau beberapa karakter khas, tetapi tidak mengorganisasikan aktivitas politik dan tidak menyadari identifikasi dan tujuan kelompok.

Pengelompokan kateegorial berdasarkan beberapa faktor yaitu perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dam perbedaan pendidikan.

b. Kelompok Sekunder

Kelompok sekunder terdiri dari orang yang memiliki ciri yang sama dan menyadari identifikasi tujuan kelompoknya. Kelompok sekunder dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kuat lemahnya identifikasi individual terhadap kelompok, lamanya seseorang menjadi anggota kelompok, pengutamaan politik bagi para pemimpin suatu kelompok. Klasifikasi kelompok sekunder yaitu pekerjaan, status sosial atau kelas sosial, kelompok etnis.

c. Kelompok Primer

Kelompok primer terdiri dari orang – orang yang sering melakukan interaksi secara langsung seperti pasangan suami istri, orang tua dengan anak, ataupun kelompok bermain.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Sosiologis sering disebut *Mazhab Michigan* yang berarti adanya sikap politik pada pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang dapat memperngaruhi perilaku politiknya.

Sikap dapat terbentuk adanya sosialisasi yang berlangsung lama. Bahkan sikap pemilih pada usia dini dapat menerima pengaruh politik

dari orang tua. Oleh karena itu menurut pendekatan psikologi sosialisasilah yang sebenarnya menentukan perilaku memilih

Pemilih sebelum menjatuhkan pilihannya pada kandidat atau partai tertentu dalam keadaan ngambang, bila tidak ada penguatan. Karena pemilih masih dipengaruhi oleh lingkungan seperti perilaku orang sekitar yang berbeda pendapat (Kusnaedi, 2009:188).

3. Pendekatan Rasional

Pendekatan Rasional berkaitan dengan orientasi pemilih, sehingga pendekatan ini berguna untuk melengkapi pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Para pemilih melakukan “penilaian” yang valid terhadap tawaran partai. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapatkan informasi yang cukup akurat, sehingga tindakan para pemilih ini bukanlah faktor kebetulan atau untuk kepentingan sendiri melainkan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis.

Pendekatan Rasional ini digunakan pemilih untuk menentukan sikap dan timbangan berdasarkan pertimbangan rasional dan logis. Hal ini dibuktikan dengan mempertimbangkan ssetiap tawaran yang telah diberikan oleh kandidat apabila tidak menguntungkan maka di abaikan saja.

Ciri- ciri pemberi suara rasional meliputi lima hal yaitu (Adman Nursal, 2004:54)

- a. Dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan pada alternative
- b. Dapat membandingkan apakah sebuah alternative lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain.
- c. Menyusun alternatif dengan cara transistif : jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C
- d. Memilih alternatif yang tingkat preferensinya lebih tinggi.
- e. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif yang sama.

Secara teoritis, Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama yaitu (Saiful Munjani, 2012:6)

1. Model Sosiologis

Model yang terawal muncul dalam tradisi studi perilaku pemilih. Model ini berkembang di Amerika pada tahun 1950-an dan dibangun dengan asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/ kedaerahan/ bahasa.

Dalam suatu masyarakat, dukungan terhadap partai atau calon tertentu mungkin juga terkait dengan pola-pola hubungan patron-klien antara

pemilih dengan calon yang terkait dengan partai tertentu. Ketergantungan seseorang secara sosial-ekonomi kepada orang lain yang punya hubungan dengan partai atau calon tertentu.

Model sosiologis ini biasanya terkait dengan jenis pekerjaan, pendidikan, dan juga tingkat pendapatan. Orang yang berpendapatan lebih baik memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk ikut serta dalam pemilu karena mempunyai akses yang luas dalam mendapatkan informasi. Seorang pemilih dengan latar belakang kelas sosial ke bawah biasanya lebih cenderung memilih partai politik dan calon pejabat publik yang dipandang dapat memperjuangkan perbaikan kelas sosial mereka, sedangkan perilaku pemilih pada kelas atas lebih cenderung memilih partai yang dianggap dapat memperjuangkan kepentingan mereka sebagai kelas atas.

Faktor sosiologis lainnya yaitu agama, sehingga pemilih lebih cenderung memilih partai atau kandidat yang sama agamanya seperti orang Islam memilih partai yang ber-platform keagamaan yang sama.

2. Model Psikologis

Menurut model ini, seorang warga berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau berada dalam jaringan sosial akan tetapi ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya

informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan.

Ketertarikan kepada politik juga dipercaya terkait dengan *political efficacy*, yakni perasaan seseorang bahwa dirinya mampu memahami dan menentukan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan publik: bahwa dirinya merasa optimis dan kompeten dalam melihat dan menyikapi masalah – masalah public yang dihadapi suatu bangsa.

Warga semacam ini sangat optimis bahwa pemilu berguna dan positif bagi kegiatan publik. Sikap ini mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Sebaliknya warga yang pesimis, acuh, sinis dari sistem politik ia hidup merasa tak mampu memahami apa yang sedang berlangsung dalam pemerintahan. Politik demokrasi malah dipandang sebagai sesuatu yang rumit, yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan warganya.

Model psikologis tentang perilaku pemilih ini mencakup identifikasi diri dengan partai politik atau identitas partai, opini tentang kualitas tokoh – tokoh partai atau calon – calon yang bersaing dalam pemilihan presiden. Model Psikologis juga membahas tentang peran figure seorang kandidat dengan pengalaman dasar atas calon untuk mempengaruhi keputusan pemilih dalam menentukan pilihannya.

3. Model Pilihan Rasional

Menurut Perspektif rasionalitas pemilih ini, seseorang warga berperilaku rasional. Seperti menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil yang maksimal dengan ongkos minimal. Model pilihan rasional berkaitan dengan seseorang dalam memilih calon atau partai apabila calon atau partai mampu membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya meliputi keadaan ekonomi seorang pemilih harus dapat dibantu oleh calon untuk lebih baik lagi, maka dari itu seorang pemilih tidak membutuhkan informasi yang terlalu detail dan akurat dari seorang pemilih atas posisi calon atau partai atas isu tersebut, juga atas kemampuan calon atau partai dalam memenuhi janji- janjinya

1.5.2.6.2 Dinamika Perilaku Partai Politik atau Organisasi

Organisasi adalah kumpulan orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan bersama (Saefullah, 2007:62). Walaupun demikian, tidak semua kumpulan orang bisa disebut organisasi seperti dalam pengertian umum (Saefullah, 2007:62). Dalam pengertian sosiologi, kumpulan orang dibedakan dalam primary group dan secondary group (Stebbins, 1987:104-105). Primary group yang disebut juga informal group merupakan kumpulan orang dalam melakukan kegiatan bersama yang tidak memerlukan batasan dan aturan tertentu. Hal tersebut menurut (Saefullah, 2007:63) diumpamakan seperti kegiatan bersama menonton suatu pertunjukkan, kegiatan bersama mengerjakan sawah atau

mencangkul diladang dan lain sebagainya, dan termasuk juga kegiatan kekeluargaan atau kehidupan rumah tangga. Secondary group yang disebut juga formal group adalah kumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan bersama dengan aturan-aturan, pembagian kerja, serta tujuan yang ditentukan secara eksplisit. Berbeda dengan primary group di mana hubungan antara anggota kelompok bersifat informal, maka dalam secondary group hubungan tersebut bersifat formal berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kelompok orang dalam pengertian *secondary* dan formal inilah yang melahirkan organisasi yang dikenal secara umum. Sebenarnya dalam pengertian organisasi, primary group termasuk juga organisasi tetapi disebut organisasi informal karena tidak mempunyai aturan dan ketentuan yang mengikat secara formal. Terkadang dalam kesempatan-kesempatan khusus, organisasi informal sering digunakan untuk memperlancar organisasi formal. Alasan lain lahirnya suatu organisasi karena pada diri manusia ada dorongan untuk bergaul dan tidak bisa memisahkan dirinya dengan orang lain. Mereka akan bergabung karena ada kesamaan tujuan dan kesesuaian peraturan atau norma yang ditentukannya. Oleh karena itu Richard L. Daft (1992:7-8) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang mempunyai empat elemen kunci yang menandai perilakunya, yaitu: social entities, goal directed, deliberately structured activity system, and identifiable boundary. Lebih lanjut Richard L. Daft (1992:7-8) menjelaskan empat

elemen kunci yang menandai perilaku organisasi sebagai kesatuan sosial, yaitu:

a. *Social Entities*, adalah organisasi terdiri dari susunan orang-orang dan kelompok orang yang merupakan bangunan kerja sama berdasarkan peranannya masing-masing. Mereka melakukan interaksi satu sama lain untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam organisasi. Sebagai suatu kesatuan sosial maka kekuatan pertama organisasi adalah sumber daya manusia yang terbagi-bagi berdasarkan fungsi-fungsi tersebut. Kekuatan individual sumber daya manusia dalam organisasi secara kumulatif akan menjadi kekuatan sumber daya manusia organisasi sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

b. *Goal Directed*, adalah organisasi dibentuk atau didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi dan orang-orang yang ada didalamnya tertuju pada tujuan tersebut. Tujuan yang akan dicapai suatu organisasi bisa berupa tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, bergantung pada tahap kegiatan dan strategi yang dipilihnya. Suatu organisasi bisa juga mempunyai lebih dari satu tujuan bergantung pada perencanaan yang dibuatnya tetapi biasanya sasaran akhirnya satu. Terminologi yang digunakan dalam ilmu administrasi adalah object dan goal. Organisasi

bisa mempunyai object bermacam-macam tetapi pada akhirnya tertuju pada goal.

c. *Deliberately structured activity system*, adalah organisasi merupakan sistem susunan kegiatan yang diatur dengan penuh pertimbangan. Sebagai suatu sistem kerja sama susunan organisasi terbagi-bagi dalam bagian-bagian atau unit kerja secara teratur dan terkoordinasi sehingga antara bagian-bagian atau unit kerja tersebut memperlihatkan kegiatan yang harmonis dan sinkronis.

d. *Identifiable boundary*, adalah banyaknya tingkatan dalam susunan organisasi yaitu bahwasannya setiap organisasi mempunyai batasan kerja yang menunjukkan adanya kegiatan di dalam lingkungan organisasi dan ada kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar. Banyaknya bagian-bagian atau unit kerja bergantung pada besar kecilnya organisasi. Demikian pula banyaknya tingkatan dalam susunan tersebut disesuaikan dengan kedudukan dan lingkungan kerja dari organisasi yang bersangkutan. Anggota dalam organisasi sendiri mempunyai kepentingan yang berbeda, ada yang hubungannya dengan perolehan uang atau pendapatan, ada yang hubungannya dengan prestise atau kedudukan, ada yang hubungannya dengan penyaluran hobi atau kesenangan, dan alin sebagainya. Walaupun secara individual ada perbedaan kepentingan tetapi dalam hubungannya dengan tujuan organisasi semua anggota mempunyai

kepentingan anggota-anggotanya. Orang-orang yang masuk atau menjadi anggota organisasi adalah orang-orang yang mempunyai harapan dan kepentingan dalam organisasi yang bersangkutan. Mereka tidak mempersoalkan macam dan bentuk organisasinya, tetapi dapat merasakan sejauh mana kepentingan mereka terpenuhi oleh organisasi yang dimasukinya. Seperti halnya organisasi negara yang ideal adalah organisasi yang dapat memenuhi kepentingan seluruh warga negaranya, dan bukan dilihat dari sifat modern atau tradisionalanya.

Dalam struktur organisasi yang ideal menurut Weber (1998:47) adalah organisasi yang bersifat professional. Setiap jabatan dan tugas dalam organisasi harus dipegang oleh orang atau tenaga kerja yang sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya. Hal ini harus dilakukan secara berencana sejak penerimaan dan penempatan pegawai. Apabila dalam perkembangannya terjadi ketidakcocokan antara jabatan dengan kemampuan yang dimiliki orang yang bersangkutan maka harus segera diadakan perubahan sebelum terjadi masalah karena ketidak-cocokan tersebut. Secara umum organisasi yang ideal adalah organisasi yang mampu mengikuti perkembangan yang terjadi. Dengan kata lain ada sifat fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan. Walaupun demikian, organisasi yang ideal bukanlah organisasi yang karena harus mengikuti perkembangan dengan mengorbankan tujuan

utama dan prinsip dasar organisasi. Dalam kenyataan tidak sedikit terjadi kehidupan organisasi yang karena ingin mengikuti perubahan umum sampai tidak kelihatan lagi prinsip dasar dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut Richard L. Daft (1992:12-13), untuk menilai ideal atau tidaknya suatu perilaku organisasi tidak hanya dilihat dari bentuk dan struktur organisasi yang bersifat statis. Sifat ideal perilaku organisasi harus diukur dari gerak kegiatan yang dilakukan organisasi dalam merealisasikan program-program untuk mencapai tujuan utama yang dikehendaknya. Semuanya akan tergantung pada orang-orang atau sumber daya manusia organisasi yang dimiliki dan yang akan ditentukan oleh kemampuan untuk menggerakkan organisasi. Atau dengan kata lain, pada akhirnya akan bergantung pada siapa yang diberi kewenangan untuk memimpin atau mengatur kegiatan-kegiatan organisasi. Mungkin saja bentuk dan struktur organisasi dipandang cukup baik dan memadai kebutuhan tetapi karena orang-orang yang menggerakkannya tidak mempunyai kemampuan maka organisasi tersebut dengan sendirinya menjadi tidak baik. Organisasi yang menjadi tidak baik secara langsung akan berpengaruh pada perilaku organisasinya.

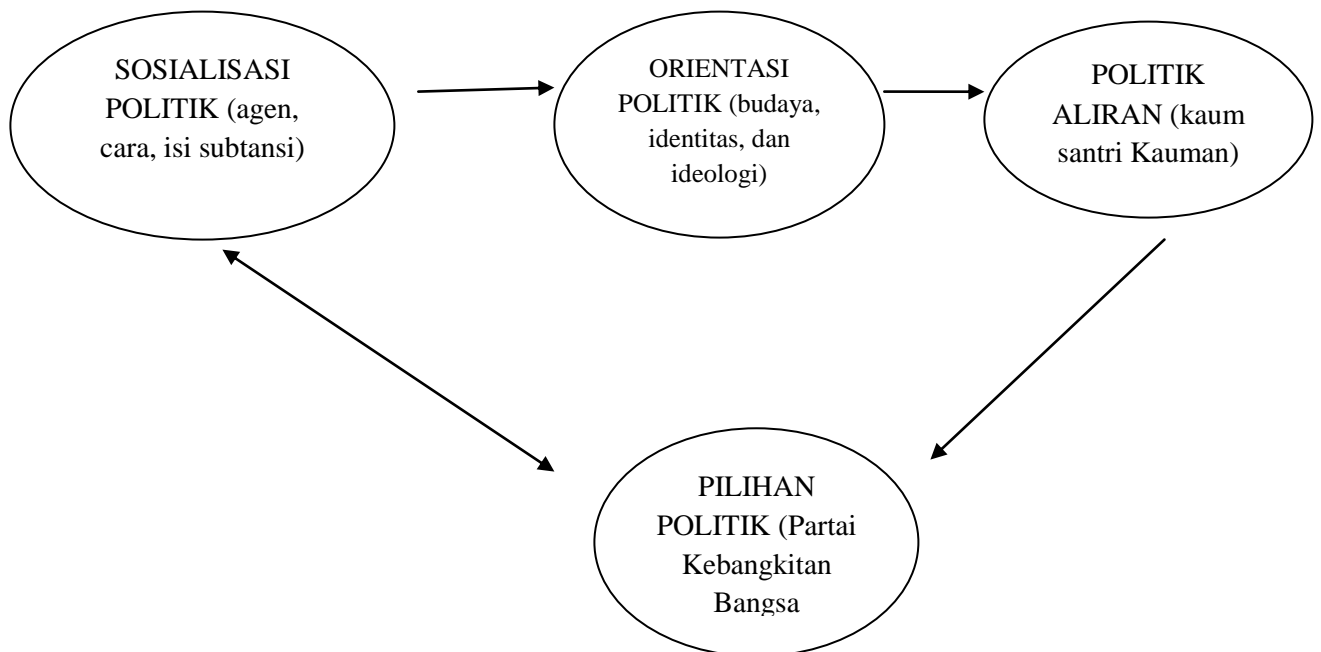
Berdasar uraian di atas, organisasi adalah wadah kerja sama orang-orang dalam melakukan suatu kegiatan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, berdirinya suatu organisasi karena ada

tujuan yang ingin dicapainya. Dalam mencapai kebutuhan tersebut ada yang mempunyai ruang lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Secara konseptual Richard L. Daft (1992:14) mengungkapkan bahwa organisasi dapat dipandang dalam pengertian statis dan dalam pengertian dinamis. Dalam pengertian statis organisasi hanya berupa struktur kerja sama yang menunjukkan pembagian tugas antara pengurus dan hubungan dengan anggotanya. Sedangkan dalam arti dinamis organisasi menggambarkan kegiatan yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan serta merealisasikan program-program kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam merealisasikan program-program kerja yang telah ditetapkan tersebut kemudian menjadi perilaku organisasi. Secara sosiologis Richard L. Daft (1992:15), mengungkapkan bahwa organisasi dibutuhkan manusia untuk mengatur kerja dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama dan kepentingan yang sama. Oleh karena itu organisasi mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam pencapaian tujuan bersama. Walaupun demikian keberhasilan kegiatan suatu organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh susunan kerja samanya saja tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku orang-orang dalam organisasi atau yang menjadi anggota, terutama oleh mereka yang menjadi pimpinan atau pengurus organisasi yang bersangkutan.

Perilaku dari orang-orang di organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi oleh publik dipandang sebagai perilaku organisasi yang bersangkutan. Ketika dalam merealisasikan berbagai program organisasi tersebut mereka melakukannya dengan baik dan penuh perencanaan, maka publik akan menilai organisasi yang bersangkutan berperilaku baik. Sebaliknya, jika orang-orang dalam organisasi tersebut bertindak buruk, maka buruk pulalah perilaku organisasinya.

1.5.3 Kerangka Berfikir

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir



Sosialisasi dimaknai sebagai Pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu berbagai ketrampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif dan sikap yang perlu untuk menampilkan peranan yang sekarang atau sedang diantisipasi... (dan terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia norma dan peranan-peranan baru masih harus dipelajari. (David F. Aberta, 1961). Motif, perilaku dan sikap yang ditanamkan berupa nilai-nilai, budaya dan ideologi politik. Budaya dan tradisi yang diwariskan kepada generasi selanjutnya ditentukan oleh elemen budaya salah satunya adalah agama. Budaya memiliki dampak yang kuat pada politik, dan agama merupakan salah satu elemen budaya yang paling kuat dan terus bertahan (Leege, Lieske, dan Wald 1991). Agama sebagai bagian dari elemen budaya memiliki peranan yang dominan mempengaruhi orientasi masyarakat Kelurahan Kauman. Budaya membentuk pandangan-dunia individu membantu menanamkan keyakinan-keyakinan dasar, menganjurkan perilaku yang tepat dan menentukan identitas pribadi (Wildavsky 1987). Melalui sosialisasi Politik, menurut Gabriel A. Almond, seperti dikutip Arifin Rahman, mengemukakan bahwa sosialisasi politik menunjuk pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik pada generasi berikutnya. Patokan-patokan dan keyakinan masyarakat

Kelurahan Kauman berdasarkan pada prinsip ajaran dan kepercayaan Islam. Penyerapan keyakinan dan patokan tersebut tidak dapat dilakukan secara pribadi melainkan harus melibatkan agen – agen sebagai perantara penyerapan keyakinan dan patokan tersebut. Agen sosialisasi politik meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya atau teman sejawat (*peer group*), media massa, dan organisasi yang ada dalam masyarakat (Sunarto,2004:21)

Sosialisasi politik dapat dilakukan dengan bentuk dan metode penyampaian pesan politik, sosialisasi politik dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik (Ambo Upe: 10-11, 2008). Pendidikan politik merupakan suatu proses yang terjadi secara dialogis antara komunikator dan komunikan. Melalui metode penyampaian pesan ini, anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, simbol politik, norma-norma dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, maupun melalui pendidikan non-formal lainnya, baik melalui kegiatan kursus, diskusi, pelatihan yang serba disiplin dan ketat, bagi partai politik melakukan hal ini dalam sistem totaliter. Sedangkan yang dimaksud dengan indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi anggota masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol-simbol yang dianggap mereka sebagai suatu hal yang baik dan ideal. Secara

konkret, metode ini dilaksanakan melalui forum pengarahan yang penuh dengan *pressure* secara psikologis. Sosialisasi politik sebagai proses untuk membentuk perilaku politik masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi orientasi politik masyarakat tersebut. Orientasi masyarakat Kelurahan Kauman menurut Eagly dan Chaiken mengemukakan bahwa sikap seorang santri dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek politik, yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku. Sebagai hasil evaluasi, sikap yang disimpulkan dari berbagai pengamatan terhadap objek diekspresikan dalam bentuk respon kognitif, afektif (emosi), maupun perilaku. Sikap dan tingkah politik tersebut yang nantinya akan membawa pada orientasi politik masyarakat yang menerima sosialisasi tersebut. Sosialisasi politik yang membentuk orientasi politik melalui pemahaman sikap politik dari suatu obyek politik. Oleh karena itu, menurut Almond (dalam Setiajid, 2011:26) orientasi politik seseorang terhadap obyek politik dibedakan menjadi

1. Orientasi positif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan, dan evaluasi positif terhadap obyek politik.

2. Orientasi negatif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang rendah, perasaan, dan evaluasi negatif yang tinggi terhadap obyek politik.
3. Orientasi netral, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan frekuensi ketidakpedulian yang tinggi atau memiliki tingkat orientasi yang sangat terbatas bahkan tidak memiliki orientasi sama sekali terhadap obyek-obyek politik.

Dari orientasi politik tersebut maka akan terbentuk masyarakat Kelurahan Kauman yang termanifestasi sebagai golongan santri. Kondisi masyarakat Kelurahan Kauman sebagai kaum santri memiliki sikap dan orientasi politik positif terhadap nilai-nilai, pengetahuan atau pemahaman masyarakat sebagai kaum santri. Orientasi politik yang positif akan membawa pada pilihan politik lurus dengan sikap dan orientasi santri terhadap partai politik berbasis masa islam khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini merujuk pada struktur sosial masyarakat yang akan membentuk partai politik, yang kemudian dikenal dengan konsep *social cleavage* (Lipset dan Stein Rokkan, 1967)

1.6 Operasionalisasi Konsep

Dimensi Sosialisasi Politik dalam penelitian ini adalah Pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu berbagai ketrampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif dan

sikap yang perlu untuk menampilkan peranan yang sekarang atau sedang diantisipasi... (dan terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia norma dan peranan-peranan baru masih harus dipelajari (David F. Aberta,1961). Ada tiga mekanisme, sebagaimana ditulis oleh oleh Rush dan Althoff(1997:40) yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi.

1. Imitasi merupakan peniruan terhadap tingkah laku individu –individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi maupun motivasi.
2. Intruksi merupakan peristiwa penjelasandiri. Seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang intruktif sifatnya, misalnya dalam beraneka tipe pendidikan kejuruan sambil bekerja dan beberapa diantaranya agak relevan dengan tingkah laku politik
3. Motivasi sebagaimana dijelaskan Le Vine merupakan bentuk tingkah laku yang tepat cocok yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (*trial and error*)

Selanjutnya sosialisasi politik berdasarkan tipenya dibedakan menjadi sosialisasi formal dan sosialisasi informal (Syarbani dkk, 2004). Sosialisasi formal yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut Undang-Undang dan peraturan

pemerintah yang berlaku. Sosialisasi formal yang terjadi di Kelurahan Kauman Kota Semarang melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun lembaga keagamaan yang secara berkesinambungan memberikan pembelajaran kehidupan agama, sosial, dan politik. Sedangkan sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan, atau sifatnya tidak resmi. Sosialisasi informal di Kelurahan Kauman Kota Semarang dilakukan melalui komunitas atau perkumpulan kelompok-kelompok kecil keagamaan dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, dalam pola sosialisasi salah satu unsur penting yang menentukan sosialisasi adalah agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya atau teman sejawat (*peer group*), media massa, dan organisasi yang ada dalam masyarakat (Sunarto, 2004:21). Agen sosialisasi politik yang berperan di Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah selain keluarga, media massa, teman sebaya tetapi juga sekolah dan organisasi masyarakat. Sekolah yang ada di Kelurahan Kauman Kecamatan Semarang Tengah sebagian merupakan sekolah berlatar Islam. Sedangkan organisasi masyarakat yang berkembang di Kelurahan Kauman adalah organisasi keagamaan di masjid – masjid dan pesantren. Kemudian agen – agen tersebut melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode penyampaian pesan politik yang dilakukan dengan dua cara yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik (Ambo Upe, 10-11: 2008). Pendidikan politik

dilakukan melalui penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan secara dialogis. Dalam hal pendidikan politik di Kelurahan Kauman Kecamatan Semarang Tengah dapat dilakukan melalui pendidikan formal, diskusi, kursus, maupun pelatihan. Diskusi dan kursus yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kauman dilakukan diantara kegiatan keagamaan untuk menyampaikan pesan politik. Pendidikan politik dilakukan sebagai upaya untuk menyampaikan pesan dan nilai politik seperti peran pemerintah, sistem politik, dan partai politik dan sebagainya. Sedangkan indoktrinasi politik adalah proses penyampaian pesan politik yang dilakukan sepihak oleh penguasa untuk menyampaikan nilai-nilai yang dianggap benar. Indoktrinasi politik ini dilakukan oleh penguasa yang biasa mendapatkan tekanan psikologis. Dalam hal ini tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungan Kelurahan Kauman Kecamatan Semarang Tengah sebagai yang *'dituakan'* serta memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi nilai – nilai dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pola sosialisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola sosialisasi partisipatif dimana sosialisasi ditekankan pada cara yang lebih lunak tanpa adanya paksaan dan hukuman bagi klien yang tidak patuh. Dalam hal ini klien yang dimaksud adalah masyarakat Kauman dan pihak yang memberikan nilai adalah kyai sebagai tokoh masyarakat. Kyai memberikan nilai dengan memberikan alternatif-alternatif politik yang ada di Kauman. Selain itu,

konsep sosialisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola sosialisasi demokratis yang lebih menekankan pada aspek hukuman dan pujian yang diberikan secara tidak langsung. Hukuman tidak diberikan secara nyata kepada masyarakat Kauman yang tidak patuh kepada penjelasan kyai di Kauman sedangkan pujian sendiri tidak selalu diberikan kepada masyarakat Kauman yang patuh.

Konsep selanjutnya yang digunakan peneliti adalah konsep kaum santri dan orientasi politiknya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kaum santri merupakan kaum yang sangat taat menjalankan ibadah yang biasanya tinggal di perkotaan jauh dari budaya kejawaan. Menurut Wijanarka pola tata ruang daerah Kauman di Jawa pada umumnya selalu ada pusat pemerintahan, alun-alun, dan masjid besar yang di sekitarnya dikelilingi rumah-rumah penduduk yang padat. Lingkungan di Kauman Kota Semarang lokasinya sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kota Semarang di Jalan Pemuda, Masjid Agung Kauman, serta alun-alun walaupun sekarang alun-alun sedikit bergeser di arah Tugu Muda. Kegiatan ekonomi masyarakat Kauman biasanya bergantung pada sektor perdagangan sehingga dekat dengan Pasar Johar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Mayoritas penduduk Kelurahan Kauman Kota Semarang 50 % berprofesi sebagai pedagang di Pasar Johar walaupun seiring dengan perkembangan zaman penduduk mulai beralih profesi selain berdagang

barang dan jasa di Pasar Johar (Sumber: Monografi Kelurahan Kauman Kota Semarang).

Kehidupan sosio-religius masyarakat Kauman yang religious serta taat pada ajaran agama Islam membawa orientasi politiknya mengarah pada partai politik berhaluan Islam dan perserikatan muslim seperti *Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul ulama, Partai Sarekat Islam Indonesai, Majelis Syuro*, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembanguna (PPP) dan lainnya. Dalam hal ini PKB diartikan sebagai partai yang dibentuk oleh organisasi Islam dan berbasis masa Islam sehingga memilikihaluana pemilih khusus di sekitar kehidupan pesantren dan masjid. Pentingnya arti santri secara politis pada dasarnya berawal dari kenyataan bahwa dalam Islam batas antara agama dengan politik tipis sekali. Islam adalah agama sekaligus merupakan pandangan hidup.

Seloanjutnya konsep politik aliran dalam penelitian ini dimaksudkan mengacu pada konsep dari Clifford Greetz yang menyatakan bahwa aliran disusun dari keseluruhan sistem partai politik yang berakar dari asosiasi khusus di sekitar partai politik yang mewakili pandangan sosial politik secara khusus dalam kehidupan masyarakat Kauman. Pandangan yang dimaksud disini adalah pandangan politik yang didasarkan pada ajaran Islam dan tuntunan walisongo sebagai jembatan

Islam yang telah disepakati dan dijalani bersama dalam kehidupan masyarakat Kauman. Dalam hal ini politik aliran berlaku di Kauman ketika PKB disini sebagai partai yang diasosiasikan dengan partainya wali yang dianggap secara spesifik mewakili kepentingan masyarakat Kauman dan hingga saat ini masih menjadi partai dominan di daerah Kauman Kota Semarang. Dalam penelitian ini PKB diasosiasikan dengan partai yang dibentuk oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan memiliki massa berbasis Islam.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Obyek alamiah yang dimaksud oleh Sugiyono adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari

obyek relatif tidak berubah. Jadi selama melakukan penelitian tentang Pola Sosialisasi Politik Kaum Santri di Kelurahan Kauman, peneliti tidak memanipulasi data, situasi, keadaan tempat penelitian, penelitian ini berjalan secara apa adanya sesuai dengan konsep teoritis yang benar secara normatif maupun konsep empiris yang sesuai dengan fakta di lapangan.

Metode Kualitatif menurut Creswell (1998) adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami, Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007) menyebutkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga merujuk pada penelitian deskriptif kualitatif. Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif adalah terhadap makna. Dalam hal ini penelitian naturalistic tidak peduli terhadap persamaan dari obyek penelitian melainkan sebaliknya mengungkap tentang pandangan perbedaan kehidupan orang-orang. Hal tersebut memperkuat bahwa makna dari setiap orang juga berbeda-beda oleh karena itu tidak mungkin meneliti karakteristik makna

perilaku yang berbeda melainkan hanya kepada manusia. Dengan hal ini, maka penelitian tentang Pola Sosialisasi Politik Kaum Santri di Kelurahan Kauman Kota Semarang sebagai hasil dari konstruksi pemikiran secara teoritis maupun empiris yang dinamis dan penuh dengan makna. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Sugiyono yang menyebutkan bahwa realitas dalam metode penelitian kualitatif merupakan konstruksi dari pemahaman terhadap semua data dan maknanya.

Berdasarkan teori Frankl yang menyebutkan bahwa tidak ada makna hidup yang bersifat umum atau sama antara manusia melainkan makna unik yang berasal dari situasi-situasi individual, maka ketika peneliti melakukan penelitian tentang Pola Sosialisasi Politik Kaum Santri di Kelurahan Kauman Kota Semarang yang masih kuat mempertahankan ideologi dan sikap politik sebagai kaum santri dengan fakta kemunduran politik aliran karena partai berbasis masa Islam makin sepi peminat. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yang secara teliti peneliti mengamati pola sosialisasi politik masyarakat Kelurahan Kauman sebagai daerah santri. Hal ini sesuai dengan teori dari John Creswell yang menyatakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa,

aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam. Sesuai dengan hal tersebut maka wilayah penelitian ini hanya terbatas di satu wilayah Kelurahan Kauman dan penelitian ini mengungkap secara detail pola sosialisasi politik masyarakat Kelurahan Kauman sehingga memiliki orientasi politik yang berbeda secara basis sosial dan politik alirannya.

1.7.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi dan situs penelitian maka tujuan dan obyek sasaran penelitian ditetapkan sehingga peneliti akan dimudahkan untuk meneliti secara detail dari kasus yang terjadi. Oleh karena itu, untuk memperoleh data primer berupa data deskriptif hasil wawancara yang mendalam sehingga data didapatkan dari pihak yang berkompeten atau paham tentang situasi politik yang kemudian ditetapkan lokasi penelitian di Kecamatan Semarang Tengah.

Kemudian yang dimaksud dengan situs pada penelitian ini adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan untuk merujuk informasi secara detail penelitian tentang Pola Sosialisasi Politik Kaum Santri di Kauman Kota Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil situs di Kauman untuk dapat menggambarkan pola sosialisasi yang terjadi di daerah santri tersebut.

1.7.3 Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian kualitatif, dapat menggunakan model *criterion-based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subyek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, penelitian tentang Pola Sosialisasi Politik Kaum Santri di Kelurahan Kauman Kota Semarang mengambil subyek penelitian adalah warga Kelurahan Kauman yang memiliki orientasi politik tertentu dan tokoh masyarakat yang sekaligus berperan sebagai pemuka agama yang menentuka proses sosialisasi politik warganya. Selain itu, penentuan subyek penelitian ini juga didasarkan pada teknik sampel, yakni *purposive sampling* yang mengambil subyek penelitian sesuai dengan tujuan maupun kebutuhan data mengenai sosialisasi dan orientasi politik di Kelurahan Kauman.

1.7.4 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif sebagai berikut:

1. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 2:1996). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi sejarah adanya Kelurahan Kauman sebagai daerah santri, letak geografis Kelurahan Kauman, Keadaan sosial-politik masyarakat setempat, serta keadaan dan demografi Kelurahan Kauman
2. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bilangan atau berbentuk angka(Sugiyono, 15: 2010). Dalam hal ini data kuantitatif yang dipergunakan adalah jumlah pemilih yang telah terdaftar di Pemilu 2014 tetap di Kelurahan Kauman, data mengenai tingkat pendidikan warga, serta data hasil Pemilu 2014 sebagai indikator orientasi politik masyarakat Kelurahan Kauman.

1.7.5 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh (Suharsimi, 29). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan peneliti (petugas) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer di penelitian ini adalah pemuka agama sebagai tokoh masyarakat di Kauman yakni Bapak Yaman, Haji Mashuni, dan Muhaimin, lurah Kelurahan Kauman yakni Bapak Helmi, dan masyarakat Kelurahan Kauman yang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan dan asli orang Kauman sudah bertempat tinggal puluhan tahun di Kauman, yakni Mbah Saminah, Majid, Jihan, Yusuf, Ibu Rusminingsih.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data pertama (data primer). Dapat juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, gambar dan data kepustakaan dari buku, jurnal, maupun surat kabar yang relevan dengan tema penelitian ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013) menyebutkan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakuakn pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada

observasi berperan (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Berdasarkan teori tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Peneliti melakukan wawancara semistruktur (*semistruktur interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2013)

2. Pengamatan (observasi)

Menurut Sugiyono melalui observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi yang berarti peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat Kelurahan Kauman melainkan mengamati kegiatan sosial-politiknya untuk mengetahui orientasi politik masyarakat.

3. Dokumen

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, dokumen yang

digunakan untuk mendukung data hasil wawancara adalah berupa artikel di media massa mengenai subyek pada subyek satu dan dua, serta foto-foto pribadi pada subyek tiga. Subyek satu dan dua pada penelitian ini telah beberapa kali diliput oleh media massa seperti surat kabar, majalah, televise, sehingga peneliti memanfaatkan dokumentasi tersebut untuk mengumpulkan data penelitian setelah wawancara.

1.7.7 Teknik Analisis dan Intrepetasi Data

Analisis data Patton merupakan proses menngatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakuakn dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles dan Huberman yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisi data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berupa hasil wawancara terhadap beberapa subyek.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentative. Kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

1.7.8 Uji Kualitas dan Keabsahan Data

Setiap penelitian membutuhkan uji keabsahan untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Dalam penelitian kualitatif yang diuji datanya. Oleh karena itu, menurut Susan Staick menyatakan bahwa penelitian kualitatif menekankan lebih pada aspek validitasnya. Pada

penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya menurut Sugiyono. Jadi pengertian reliabilitas pada penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif karena realitas selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula.

Sugiyono juga mengemukakan beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas data, diantaranya perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan *member check*

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai teori. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini hanya digunakan triangulasi teori sebagai teknik keabsahan data. Triangulasi teori ini untuk menguji kredibilitas

data dilakukan dengan cara mengecek data terhadap konsep teori yang relevan. Misalnya dalam penelitian ini peneliti ingin menguji data tentang sosialisasi politik masyarakat Kelurahan Kauman yang diuji menggunakan teori pemikiran politik aliran juga yang relevan.

2. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data dengan tujuan agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2013). Dengan melakukan *member check*, peneliti dapat mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Jika dari data yang ditemukan kemudian disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut dinyatakan valid sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Sebaliknya, apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsiran tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

